

# INDONESIA RAYA

www.partaigerindra.or.id



**TIGA TAHUN BERGERAK BERSAMA RAKYAT**  
Gerindra Terus Kedepankan Delapan Program Aksi

GEMA UTAMA >> 5



**Meski Pimpinan DPR Ngotot PARTAI GERINDRA TETAP TOLAK GEDUNG BARU DPR**

INDONESIA >> 6



**HALIDA NURIAH HATTA**  
Pejuang Ekonomi Kerakyatan dan Kesetaraan Gender

PROFIL >> 16

## GELORA

### Tiga Tahun Gerindra

**PARTAI** Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) baru tiga tahun berkiprah. Waktu yang masih muda bagi sebuah partai, perjuangan yang masih belia untuk bangsa. Sebagai alat perjuangan, Gerindra lahir dari semangat untuk memperbaiki keadaan. Keadaan apa? Kondisi yang paradoks antara Indonesia yang kaya dan rakyatnya yang miskin. Negeri yang berlimpah sumber daya alam, tapi rakyatnya masih jauh dari kemakmuran. Kenapa bisa terjadi?

Tak lain dan tak bukan karena dua faktor. *Pertama*, haluan kita masih tak jelas. Mau kemanakah kita berlayar? Akan dibawa kemana Indonesia? *Kedua*, masalah kepemimpinan, masalah elit bangsa yang tak berpihak lagi pada rakyat. Bahkan ada pengkhianatan elit terhadap rakyat.

Haluan menentukan tujuan. Apa cita-cita kita merdeka? Para pendiri bangsa dengan jelas menggariskan bahwa tujuan kita adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan dunia yang damai.

Melindungi segenap bangsa tentu bukan sekedar perlindungan fisik dari agresi militer atau penjajahan konvensional. Perlindungan yang lebih substansial adalah proteksi seutuhnya: bebas dari kemiskinan, kebodohan dan ketidakpastian. Kita ingin rakyat cukup pangan, sandang dan papan. Kita ingin rakyat menjadi cerdas dan mampu bersaing dalam percaturan global. Kita ingin manusia Indonesia mencicipi kemakmuran yang diolah dari kekayaan alam, dari pertanian dan industri, serta dari inisiatif dan kreativitas.

Haluan liberal yang sedang kita jalani tak akan membawa kita pada tujuan kesejahteraan itu. Dalam sistem yang liberal, baik itu ekonomi atau politik, kekuatan ada pada individu. Siapa yang kuat dialah yang menang, dan yang lemah pasti kalah. Karenanya hasil-hasil pembangunan hanya dinikmati segelintir orang. Merekalah yang telah "merdeka" dari kemiskinan. Namun sebagian besar rakyat masih diselimuti ketidakberdayaan. Rakyat mengalami involusi kemiskinan. Ketika harga-harga membubung tinggi, rakyat yang tak berdaya semakin tersingkirkan.

Kita yakin, keadaan akan lebih baik kalau ekonomi kerakyatan menjadi pilihan. Sesuai konstitusi Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, negara bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial. Peran negara harus ada dalam ekonomi. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menjadi alat bagi akselerasi kemakmuran rakyat, bukan akumulasi kekayaan pejabat. BUMN harus kuat dan bukan menjadi sapi perah atau jatah politik.

Kepemimpinan elit juga menentukan keberhasilan mencapai tujuan. Elit sekarang ini kebanyakan hanya memikirkan diri sendiri dan tak peduli pada nasib rakyat. Rakyat tak dianggap lagi. Rakyat hanya hadir menjelang pemilu dan pilkada, sebagai obyek manipulasi. Begitu pemilu dan pilkada usai, rakyat pun mati. Itulah pengkhianatan elit (*the betrayal of the elite*) baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Anggaran untuk rakyat tercecer di jalan. Petani, buruh, nelayan, guru, dan sebagian besar rakyat berjuang sendiri-sendiri untuk bertahan hidup, menyambung nafas yang makin terengah-engah.

Gerindra hadir ingin mengoreksi keadaan ini. Sebagai alat perjuangan, tentu saja masih banyak kelemahan dan kekurangan kita. Godaan demi godaan pasti selalu datang. Budaya politik yang korup mewabah di sekitar kita. Seperti virus yang merajalela, sewaktu-waktu ketika lengah, pasti melahap idealisme dan cita-cita. Mudah-mudahan kita bisa memupuk semangat juang dengan penuh kebanggaan. Mudah-mudahan Gerindra menjadi cahaya dalam kegelapan. ◀ **FADLI ZON**



FOTO MUSTAFAR KEMAL

## PRABOWO SUBIANTO: "Partai Gerindra Bukan Tempat Politisi Hina..."

**KETUA** Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pidato memperingati ulang tahun ketiga Partai Gerindra, Sabtu 5 Februari 2011, mengingatkan seluruh kader dan partizan Partai Gerindra bahwa partai berlambung kepala burung Garuda ini berdiri dengan tujuan membela kepentingan rakyat, dan menjaga tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menegakkan keadilan dan kebenaran.

Khusus ditujukan kepada kader Gerindra yang duduk di legislatif, mulai dari pusat hingga daerah, Prabowo menekankan agar memperjuangkan cita-cita

partai. Ia meminta mewaspadaai keinginan kelompok tertentu yang berusaha mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara kotor. "Gerindra bukan tempat politisi hina," tegas Prabowo.

Bagi mereka yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat tidak layak berada dalam perahu Gerindra. "Keinginan memperkaya diri sendiri bertentangan dengan nafas Gerindra," ucap calon Presiden dari partai Gerindra ini lebih lanjut, "Gerindra harus menjadi partai yang baik dan bersih, serta membela kepentingan rakyat."

Luar biasa, selama ini jarang

ada petinggi partai secara terang-terangan dan terbuka menyampaikan pesan moral untuk para kadernya agar jangan mau disogok atau apa pun namanya yang sifatnya tercela. Ini penting, karena Prabowo tak ingin nama baik partai tercoreng, karena ulah kader sehingga beramai-ramai masuk bui.

Memang di usianya yang ketiga tahun pada 2011 ini, Partai Gerindra berupaya tetap pada cita-cita awalnya pada saat didirikan, yaitu ingin mengangkat mayoritas rakyat dari kubangan penderitaan dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan. Gerindra menilai sistem ekonomi pasar yang dikembangkan pemerintah saat ini telah gagal mengangkat harkat dan martabat mayoritas bangsa Indonesia dari kemelaratan.

Partai Gerindra begitu eksis di pentas perpolitikan nasional langsung menyodorkan resep jitu dalam memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang. Resep itu dikenal 8 (delapan) Program Aksi, meliputi: menjadwalkan kembali pembayaran utang, menyelamatkan kekayaan negara untuk menghilangkan kemiskinan, melaksanakan ekonomi kerakyatan, delapan program desa, memperkuat sektor usaha kecil, kemandirian energi, pendidikan dan kesehatan, serta menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Pada pemilu 2009 Program Aksi ini boleh dikata belum tersosialisasikan secara luas, karena waktu itu usia Partai Gerindra belum genap dua tahun. Namun demikian, penampilan Gerindra sebagai

partai baru tidak begitu mengecewakan. Dengan persiapan yang hanya dua-tiga bulan, pada Pemilu 2009, Gerindra berhasil meraup 4,6 juta suara lebih atau 4,46%, sehingga bisa menempatkan wakilnya di DPR RI sebanyak 26 orang.

Dan, yang lebih membanggakan lagi, Gerindra langsung bertengger di papan tengah, melampaui partai Hanura, dan menggeser partai-partai lama, seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Damai Sejahtera (PDS), dan Partai Bintang Reformasi (PBR), keluar dari Senayan. Hidup Partai Gerindra, Hidup Indonesia Raya. ◀





## Membangun Kembali Indonesia Raya 8 Program Aksi Untuk Kemakmuran Rakyat

- Menjadwalkan kembali pembayaran utang luar negeri**
  - Mengalihkan dana pembayaran utang luar negeri sebagai modal untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, pangan dan energi, yang murah serta ramah lingkungan.
- Menyelamatkan kekayaan negara untuk menghilangkan kemiskinan**
  - Menjadikan BUMN sebagai lokomotif dan ujung tombak kebangkitan ekonomi.
  - Menghentikan penjualan aset negara yang strategis atau yang menguasai hajat hidup orang banyak.
  - Meninjau kembali semua kontrak pemerintah yang merugikan kepentingan nasional.
  - Mewajibkan eksportir nasional yang menikmati fasilitas kredit dari negara untuk menyimpan dana dari hasil ekspornya di bank dalam negeri.
  - Membangun industri pengolahan untuk memperoleh nilai tambah
- Melaksanakan ekonomi kerakyatan**
  - Mencetak 2 juta Ha lahan baru untuk meningkatkan produksi beras, jagung, kedelai, tebu yang dapat mempekerjakan 12 juta orang.
  - Mencetak 4 juta Ha lahan untuk aren (bahan baku bio etanol) yang dapat mempekerjakan 24 juta orang.
  - Membangun pabrik pupuk urea dan NPK dengan total kapasitas 4 juta ton.
  - Memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil.
  - Membangun sarana transportasi massal.
  - Meningkatkan pendapatan per kapita USD 2.000 menuju USD 4.000
- Delapan program Desa**
  - Listrik desa.
  - Bank dan lembaga keuangan desa.
  - Koperasi desa, lumbung, desa, pasar desa.
  - Air bersih desa.
  - Klinik desa.
  - Pendidikan desa.
  - Infrasruktur pedesaan dan daerah pesisir.
  - Rumah sehat pedesaan.
- Memperkuat sektor usaha kecil**
  - Prioritas penyaluran kredit perbankan kepada petani, nelayan dan pedagang kecil.
  - Melarang penyaluran kredit bank pemerintah untuk pembangun perumahan dan apartemen mewah, mall, serta proyek-proyek mewah lainnya.
  - Melindungi pedagang pasar tradisional dengan melarang pembangunan pasar swalayan berskala besar yang tidak sesuai undang-undang.
  - Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh migran (TKI).
- Kemandirian energi**
  - Membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air (10.000 MW).
  - Menyediakan sumber energi dengan mendirikan kilang-kilang minyak, pabrik bio etanol dan pabrik DME (pengganti LPG).
  - Membuka 2 juta hingga 4 juta Ha hutan aren dengan sistem tanaman tumpang sari untuk produksi bahan bakar etanol, sebagai pengganti BBM impor. Pembukaan lahan ini akan menjadikan Indonesia sebagai pengeksport bahan bakar nabati setelah 7 tahun masa tanam (4 juta Ha hutan aren menghasilkan sekitar 56 juta mt etanol/tahun).
- Pendidikan dan kesehatan**
  - Mencabut undang-undang bahan hukum pendidikan. Pencabut pajak buku pelajaran dan menghentikan model penggantian buku pelajaran tiap tahun.
  - Membagi sedikitnya 1 juta laptop kepada mahasiswa per tahun.
  - Melaksanakan kembali program KB (Keluarga Berencana).
  - Meningkatkan peran PKK, Posyandu dan puskesmas.
  - Menempatkan sarjana dan dokter baru melalui program pemerintah terutama di kantong-kantong kemiskinan.
  - Menggerakkan revolusi putih dengan menyediakan susu untuk anak-anak miskin.
- Menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup**
  - Melakukan penghijauan kembali 59 juta Ha hutan yang rusak serta konservasi aneka ragam hayati dan hutan lindung.
  - Mengamankan dan merehabilitasi daerah aliran sungai.
  - Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan.
  - Melindungi flora dan fauna sebagai bagian dari aset bangsa.



## SUARA RAKYAT :

### Selamat Atas Terbitnya Gema Indonesia Raya

Saya mengucapkan selamat atas terbitnya tabloid *Gema Indonesia Raya*. Semoga tabloid ini mampu memberikan pencerahan dan membela rakyat kecil. Selain itu kami berharap tabloid ini memberitakan kegiatan-kegiatan Partai Gerindra di seluruh Indonesia. Tabloid ini harus mampu menjadi referensi bagi anggota partai dan memberi informasi untuk rakyat.

SUJADI KARTA  
Jasingan, Kabupaten Bogor,  
Jawa Barat

### Sependapat Dengan Gerindra soal Komodo Jadi New 7 Wonders

Saya sependapat dengan Partai Gerindra yang mendesak pemerintah menjelaskan pembiayaan yang telah dikeluarkan untuk mengupayakan Pulau Komodo menjadi salah satu keajaiban dunia oleh yayasan New 7 Wonders. Ini penting, sebab Gerindra berusaha turut memajukan pariwisata Indonesia dengan ikut mengusahakan Pulau Komodo menjadi salah satu keajaiban dunia sehingga bermanfaat bagi dunia pariwisata nasional.

Langkah yang tepat dari Gerindra adalah menghimbau kadernya, masyarakat luas, dan instansi-instansi yang ada di Indonesia untuk terus memberikan dukungannya pada Pulau Komodo menjadi salah satu pemenang New 7 Wonders melalui voting di website mereka.

Langkah lain dari Gerindra yang patut diapresiasi adalah menghimbau pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik dengan Yayasan New 7 Wonders secara dialogis dan transparan agar tidak berpengaruh buruk terhadap investasi asing di Indonesia dan mengurangi kepercayaan luar negeri pada Indonesia.

Seperti diketahui, New 7 Wonders sempat mengancam untuk mengeliminasi Taman Nasional Komodo sebagai salah satu dari 28 finalis New 7 Won-

der karena menganggap Kemenbudpar melanggar komitmen yang telah disepakati, setelah menolak menjadi tuan rumah acara puncak atau pengumuman N7W dengan alasan finansial.

DODI SURODI  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

### Usut Buku SBY

Sebagaimana kita ketahui di beberapa sekolah telah terjadi pembagian buku-buku serial SBY. Hal ini merupakan sebuah langkah yang tidak pas dan harus diselidiki motif dan selidiki siapa yang punya ide untuk membagikan buku SBY itu. Apalagi kalau buku serial SBY itu menggunakan dana APBN, jelas merupakan sebuah tindakan yang tak lazim.

PUTRA GUNAKSA  
Kramat Jati, Jakarta Timur

### Ini Baru Gerindra

Gerindra untuk rakyat, itulah kalimat yang cocok untuk Partai Gerindra. Betapa tidak, partai ini telah mengalokasikan dana sekitar Rp1 miliar untuk pemberdayaan masyarakat yang bergerak di bidang usaha kecil dengan sistem kredit bergulir dengan bunga ringan, dan itu sudah disalurkan di Jawa Timur.

Syarat untuk memperoleh dana itu, rakyat mengajukan pinjaman dengan plafon kredit sebesar Rp2,5 juta hingga Rp5 juta. Untuk tahap awal ini, Gerindra akan mengucurkan kredit pada 200 orang. Bila berhasil maka berikutnya akan kami kururkan untuk 1.000 orang, dan tahap selanjutnya lagi untuk 5.000 orang.

AGUS SUKOCO  
Punung, Pacitan, Jawa Timur

### Tolak Gedung Baru DPR

Saya setuju dengan penolakan pembangunan gedung baru DPR di kompleks Senayan, Jakarta, seperti yang dilakukan oleh Partai Gerindra. Pembangunan ini menurut saya mubazir, apalagi ada kabar yang menyatakan

bahwa ibukota negara akan dipindah. Maka hendaknya, pembangunan gedung baru DPR itu sebaiknya diserasikan dengan wacana pemindahan ibukota. Kalau betul ibukota nanti pindah, maka gedung baru DPR menjadi tidak berfungsi maksimal, karena sudah pasti di ibukota yang baru gedung DPR akan dibangun lagi.

Oleh karena itu, anggaran pembangunan gedung yang sudah dialokasikan, sebaiknya dialihkan untuk program produktif yang dapat menyejahterakan rakyat secara konkret, seperti program pembangunan rumah sakit, pendidikan murah, atau pemberian bantuan hukum bagi TKI.

I MADE SURADA  
Bangli, Bali

### Selamat 3 Tahun Gerindra

Tak terasa Partai Gerindra telah berusia 3 tahun. Meski baru seumur jagung, namun partai berlambang kepala burung garuda ini sudah berbuat banyak buat rakyat dan bangsa. Dengan prestasi yang telah dicapai, hendaknya jangan membuat Gerindra menjadi terlena, dan teruslah berjuang untuk rakyat. Langkah Gerindra menolak pembangunan gedung baru DPR adalah yang tepat, dan dalam hal rakyat berada di belakang Gerindra. Hidup Gerindra! Maju terus Prabowo!

ANIS BARINO  
Banjarmasin, Kalimantan Selatan

## PATUK...!



Ketua DPR ngotot membangun gedung baru DPR.  
*Ada udang di balik gedung.*

Gerindra larang anggota fraksinya studi banding ke luar negeri.  
*Menghemat uang rakyat.*





# Reformasi dan Penjajahan Baru

OLEH FADLI ZON

(Wakil Ketua Umum Partai GERINDRA, Ketua Badan Komunikasi Partai Gerindra, Direktur Institute for Policy Studies (IPS), alumni MSc Development Studies London School of Economics and Political Science (LSE), Inggris.)

**HAMPIR** tigabelas tahun kita memasuki era reformasi. Sebuah era yang diharapkan dapat memperbaiki keadaan ekonomi, politik dan semua sendi-sendi kehidupan kita. Harapan itu begitu besar sehingga kita mengalami *euphoria*. Baik secara ekonomi maupun politik, mundurnya Presiden Soeharto ketika itu dianggap sebagai solusi. Namun setelah huru hara Mei 1998 dan munculnya reformasi apakah keadaan jauh lebih baik?

Kita mencatat bahwa keberhasilan utama dari reformasi adalah terbukanya belenggu politik. Ada kebebasan berpendapat dan berekspresi serta kebebasan berserikat dan berkumpul. Dalam waktu singkat, Indonesia menjadi juara ketiga demokrasi sedunia. Julukan ini tentu saja positif, dari negara yang dianggap otoriter, Indonesia kemudian menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Bersamaan dengan itu muncullah ratusan partai politik dan organisasi massa.

Di bidang ekonomi, para elit era reformasi mengadopsi berbagai kebijakan mengikuti resep lembaga International Monetary Fund (IMF) yang dianggap institusi paling mumpuni mengatasi krisis. Maka terjadilah liberalisasi di semua lini sektor ekonomi. Kepentingan asing dengan leluasa masuk ke segala penjuru, hampir tanpa rintangan. Dari hulu ke hilir, dari sektor tambang, perkebunan, perikanan, pelabuhan, perbankan, telekomunikasi dan semuanya.

Krisis ekonomi Indonesia dan Asia 1997-1998 telah menjadi banyak kajian intelektual dalam dan luar negeri. Kasus Indonesia ini menarik karena berakhir dengan tragis, berbeda dengan Thailand maupun Korea Selatan yang berhasil melakukan konsolidasi politik dan ekonomi.

Masalah utama di awal krisis adalah depresiasi rupiah dan utang swasta yang jatuh tempo juga efek penularan dari Thailand. Keterlibatan IMF dalam ekonomi politik Indonesia ketika itu ditanggapi secara beragam. Yang dominan adalah mereka yang menilai IMF sebagai penolong yang dapat memberi kepercayaan pasar. Menteri-menteri ekonomi merasa yakin IMF dapat membantu pemerintah dalam mengatasi krisis moneter. Sedangkan mereka yang skeptis dengan resep IMF merupakan kelompok minoritas, hampir tak ada resistensi.

Banyak pengamat politik maupun ekonom berpandangan bahwa krisis ekonomi Indonesia terjadi akibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang melekat pada pemerintahan Orde Baru. Cara berpikir ini masih laku hingga kini. Karena itu, pemberantasan KKN menjadi tuntutan prioritas antara lain dengan melaksanakan liberalisasi yang lebih luas di berbagai sektor khususnya ekonomi. Pandangan mereka ini sejalan dengan kebijakan yang diambil IMF berdasar rumusan Konsensus Washington: privatisasi, liberalisasi dan deregulasi.

Selain kebijakan standar, IMF juga memasukkan muatan politik dalam menghapus subsidi, monopoli dan kegiatan bisnis orang-orang yang dianggap kroni. Negara Orde Baru yang otoritarian harus dibebaskan dari urusan aktivitas ekonomi yang merupakan milik sektor swasta. Pemberantasan KKN didahulukan ketimbang stabilisasi rupiah yang sebenarnya masalah utama. KKN jelas memperburuk situasi, namun sulit dikatakan sebagai penyebab krisis. Seperti kata Wakil Menteri Keuangan Jepang masa itu, Eisuke Sakakibara, krisis moneter lebih banyak akibat perpindahan kapital global (*global capital movement*) yang juga pernah terjadi di Amerika Latin dan wilayah lain.

Keterlibatan IMF sebenarnya diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan pasar dan stabilitas rupiah. Namun harapan itu tak kunjung tiba. Dengan IMF, terjadi krisis yang lebih dalam dan kompleks. IMF salah diagnosa dan memperburuk keadaan sehingga rupiah semakin anjlok. Efek negatif dan kegagalan IMF itu disebabkan beberapa hal.

*Pertama*, kebijakan IMF tidak mempertimbangkan keadaan sosial politik Indonesia ketika itu. *Kedua*, pola penanganan krisis yang dipakai IMF--rezim moneter ketat dalam stabilisasi kurs dan stabilisasi inflasi--gagal memulihkan ekonomi Indonesia. *Ketiga*, utang IMF menjadi jebakan (*trap*) agar Indonesia tetap tergantung pada institusi ini untuk waktu yang lama. *Keempat*, IMF menganggap *enteng* masalah utang luar negeri swasta jangka pendek yang jatuh tempo. *Kelima*, janji *bail out* IMF sebesar US\$ 42,3 milyar ternyata cuma gertakan. Realisasinya hingga Mei 1998 tak lebih dari US\$ 5 milyar. *Keenam*, IMF di Indonesia menjadi agen globalisasi dengan cara liberalisasi perdagangan, privatisasi atau penjualan aset-aset negara yang penting dan vital.

Blunder terbesar IMF adalah penutupan 16 bank swasta yang diduga bank kroni pada 1 Nopember 1997. Tanpa menyiapkan perangkat pengaman lebih dulu, kebijakan ini mengakibatkan rusaknya sektor perbankan secara menyeluruh.

Pada 15 Januari 1998, Presiden Soeharto menandatangani LoI kedua. Ada 50 butir pernyataan yang harus dijalankan oleh Pemerintah Indonesia, terkait dengan kebijakan moneter, fiskal, perbankan, dan penyesuaian struktural (*structural adjustments*). Direktur IMF ketika itu, Michel Camdessus, terlihat melipat tangan dan menatap dengan wajah kemenangan pada Presiden Soeharto. Ternyata rupiah malah jatuh 10% dan terus merosot hingga minggu-minggu berikutnya. Pasar tidak merespon positif LoI kedua ini meskipun pemerintah sudah memberi konsesi yang besar.

Presiden Soeharto kemudian menyadari kegagalan IMF. Dalam pidato pertanggungjawaban SU MPR 1998, ia menyatakan resep



IMF tak ampuh menyelesaikan krisis. Soeharto mengajukan proposal "IMF Plus" dan berniat menerapkan CBS (Currency Board System) dengan mematok kurs tetap. Rencana ini ditentang oleh IMF. Camdessus memperingatkan jika CBS dijalankan, IMF tak akan melanjutkan bantuan untuk Indonesia.

Dalam pergulatan ini, Presiden AS Clinton dan utusan khusus mantan wakil presiden Walter Mondale juga menyampaikan pesan agar Soeharto tetap berjalan dalam syarat-syarat IMF dan tidak menerapkan CBS. Bahkan Menteri Keuangan AS Robert E Rubin pada awal Maret 1998 mengancam akan menghentikan bantuan jika Indonesia tidak mematuhi paket IMF.

Rubin termasuk salah seorang dalam jajaran pemerintah Clinton yang menginginkan terjadinya pergantian kepemimpinan (*regime change*) di Indonesia sebagai syarat reformasi ekonomi dapat berlangsung. Menurut Rubin, pergantian Soeharto dapat memberi kepercayaan baru pada para investor. Orang-orang di sekitar Rubin berpendapat bahwa kepemimpinan Indonesia saat itu menjadi penghambat utama pemulihan ekonomi.

Tanggal 10 April 1998, kesepakatan ketiga ditandatangani. Prioritas IMF tetap pada reformasi ekonomi mikro, tidak fokus pada krisis mata uang yang tengah terjadi. Pada 4 Mei 1998, atas saran IMF, pemerintah menaikkan harga BBM hingga 71%. Tarif listrik secara gradual juga dinaikkan. Kebijakan ini jelas semakin memberatkan rakyat yang dalam beberapa bulan telah bertambah miskin hingga ratusan persen akibat jatuhnya mata uang. Huru hara mulai merebak di Medan dan Jogjakarta.

Puncak huru hara terjadi setelah empat

mahasiswa Universitas Trisakti ditembak oleh oknum aparat. Kerusuhan di Jakarta dan beberapa kota tak terhindarkan serta memicu krisis politik yang berujung mundurnya Presiden Soeharto.

Pola kejatuhan Soeharto bukanlah hal baru. Di Amerika Latin, berkali-kali terjadi skenario yang sama. Pemenang Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz menyebut hal ini sebagai "*IMF's Four Steps to Damnation*."

Ada empat langkah pola kebijakan IMF. *Pertama*, privatisasi, yakni penjualan aset-aset BUMN kepada kroni IMF. *Kedua*, liberalisasi pasar modal, yakni membuka pasar modal agar investasi meningkat antara lain dengan mematok suku bunga tinggi. *Ketiga*, *market based pricing*, yakni menaikkan harga barang komoditas strategis seperti BBM, pangan, air bersih, dan lain-lain alias pencabutan subsidi.

Karena ekonomi rakyat makin terjepit, hidup semakin susah, maka langkah ketiga ini biasanya diikuti langkah "tiga setengah" yakni "Kerusuhan IMF" atau *IMF Riots*. Dalam kasus Indonesia, *IMF riots* itu adalah Huru-Hara Mei 1998. *Keempat*, perdagangan bebas, yang prakteknya adalah pembukaan pasar bagi produk-produk negara maju.

Dari berbagai catatan kebijakan dan peristiwa di atas, kita dapat melihat peran IMF yang signifikan dalam kejatuhan rezim Soeharto. Apalagi kalau kita mendengar pidato Michel Camdessus pada 9 Nopember 1999 ketika dia mengundurkan diri dari IMF. Camdessus mengakui bahwa apa yang dilakukannya di Indonesia memang dalam rangka menciptakan kondisi agar Presiden Soeharto jatuh. "*We created the conditions that obliged President Soeharto to leave his job*," kata Camdessus. Maka IMF-lah yang menjatuhkan Soeharto.

Apa yang bisa kita pelajari dari kejatuhan Soeharto? Euforia reformasi rasanya baru kemarin terjadi. Ledakan harapan dan janji-janji perubahan masih terngiang di telinga. Namun, reformasi yang berwatak liberal ini ternyata semakin jauh dari keinginan rakyat yaitu tercapainya kesejahteraan. Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi persoalan utama, sementara utang luar negeri masih dominan menggerogoti APBN kita. Indonesia menjadi mata rantai terlemah dalam globalisasi.

Ada yang salah tentang cara pandang kita memaknai reformasi dan berakhirnya rezim Orde Baru itu. Reformasi telah menjadi "kuda troya" liberalisasi di berbagai bidang baik ekonomi, politik, budaya, hukum bahkan konstitusi. Reformasi telah melahirkan demokrasi liberal di bidang politik dan ekonomi pasar yang kapitalistik. Sementara peran lembaga-lembaga asing termasuk korporasi transnasional semakin kuasa dalam mengambil alih aset-aset penting milik Indonesia. Reformasi yang dipimpin kalangan reformis borjuis ini ternyata telah melahirkan penjajahan baru. ◀



# Bermula dari Keprihatinan

Partai Gerindra lahir untuk mengangkat rakyat dari jerat kemelatan, akibat permainan orang-orang yang tidak peduli pada kesejahteraan.

OLEH IMAN FIRDAUS

DALAM sebuah perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, terjadi obrolan antara intelektual muda Fadli Zon dan pengusaha Hashim Djojohadikusumo. Ketika itu, November 2007, keduanya membahas politik terkini, yang jauh dari nilai-nilai demokrasi sesungguhnya. Demokrasi sudah dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kapital besar. Akibatnya, rakyat hanya jadi alat. Bahkan, siapapun yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi dan politik akan dengan mudah jadi korban.

Kebetulan, salah satu korban itu adalah Hashim sendiri. Dia diperkarakan ke pengadilan dengan tuduhan mencuri benda-benda purbakala dari Museum Radya Pustaka, Solo, Jawa Tengah. "Padahal Pak Hashim ingin melestarikan benda-benda cagar budaya," kata Fadli mengenang peristiwa itu. Bila keadaan ini dibiarkan, negara hanya akan diperintah oleh para mafia. Fadli Zon lalu mengutip kata-kata politisi Inggris abad kedelapan belas, Edmund Burke: "The only thing necessary for the triumph [of evil] is for good men to do nothing." Dalam terjemahan bebasnya, "kalau orang baik-baik tidak berbuat apa-apa, maka para penjahat yang akan bertindak."

Terinspirasi oleh kata-kata tersebut, Hashim pun setuju bila ada sebuah partai baru yang memberikan haluan baru dan harapan baru. Tujuannya tidak lain, agar negara ini bisa diperintah oleh manusia yang memerhatikan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan golongannya saja. Sementara kondisi yang sedang berjalan, justru memaksakan demokrasi di tengah himpitan kemiskinan, yang hanya berujung pada kekacauan.

Gagasan pendirian partai pun kemudian diwacanakan di lingkaran orang-orang Hashim dan Prabowo. Rupanya, tidak semua setuju. Ada pula yang menolak, dengan alasan bila ingin ikut terlibat dalam proses politik sebaiknya ikut saja pada partai politik yang ada. Kebetulan, Prabowo adalah anggota Dewan Pe-

“**Kalau orang baik-baik tidak berbuat apa-apa, maka para penjahat yang akan bertindak...**

—EDMUND BURKE—



FOTO MUSTAFA KEMAL

**PARTAI GERINDRA lahir agar negara ini bisa diperintah oleh manusia yang memerhatikan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan golongannya saja.**

nasihat Partai Golkar, sehingga bisa mencalonkan diri maju menjadi ketua umum. Namun, ketika itu Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla adalah wakil presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Mana mau Jusuf Kalla memberikan jabatan Ketua Umum Golkar kepada Prabowo?" kata Fadli.

Setelah perdebatan cukup panjang dan alot, akhirnya disepakati perlu ada partai baru yang benar-benar memiliki manifesto perjuangan demi kesejahteraan rakyat. Untuk

mematangkan konsep partai, pada Desember 2007, di sebuah rumah, yang menjadi markas IPS (Institute for Policy Studies) di Bendungan Hilir, berkumpul sejumlah nama. Selain Fadli Zon, hadir pula Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi dan Haris Bobihoe. Mereka membicarakan anggaran dasar dan

luar dugaan, ketika Hashim datang menjenguk di rumah sakit, Hashim tetap antusias pada gagasan awal untuk mendirikan partai politik.

Akhirnya, pembentukan partai pun terus dilakukan secara maraton. Hingga akhirnya, nama Gerindra muncul, diciptakan oleh Hashim sendiri. Sedangkan lambang kepala burung garuda digagas oleh

anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang akan dibentuk. "Pembahasan dilakukan siang dan malam," kenang Fadli. Karena padatnya jadwal pembuatan AD/ART, akhirnya fisik Fadli ambruk juga. Lelaki yang menjabat sebagai direktur eksekutif di IPS ini harus dirawat di rumah sakit selama dua minggu.

Fadli tidak tahu lagi bagaimana kelanjutan partai baru ini. Bahkan dia merasa pesimistis bahwa gagasan pembentukan partai baru itu akan terus berlanjut. Namun di

Prabowo Subianto.

Pembentukan Partai Gerindra terbilang mendesak. Sebab dideklarasikan berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye pemilihan umum, yakni pada 6 Februari 2008. Dalam deklarasi itu, termaktub visi, misi dan manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Budaya bangsa dan wawasan kebangsaan harus menjadi modal utama untuk mengeratkan persatuan dan kesatuan. Sehingga perbedaan di antara kita justru menjadi rahmat dan menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Namun demikian mayoritas rakyat masih berkubang dalam penderitaan, sistem politik kita tidak mampu merumuskan dan melaksanakan perekonomian nasional untuk mengangkat harkat dan martabat mayoritas bangsa Indonesia dari kemelatan.

Bahkan dalam upaya membangun bangsa, kita terjebak dalam sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar telah memporak-porandakan perekonomian bangsa, yang menyebabkan situasi yang sulit bagi kehidupan rakyat dan bangsa. Hal itu berakibat mengelembungnya jumlah rakyat yang miskin dan menganggur. Pada situasi demikian, tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia ini kecuali harus menciptakan suasana kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan.

Nah, Partai Gerindra terpenggil untuk memberikan pengabdian bagi bangsa dan negara dan bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang. ◀

## Kisah Gerindra dan Kepala Garuda

MEMBERI nama partai politik gampang-gampang susah. Karena nama partai berkaitan dengan persepsi yang akan diingat oleh masyarakat selaku konstituen. Sebelum nama Gerindra muncul, para pendiri partai ini seperti Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, Fadli Zon dan Muchdi Pr juga harus memikirkan nama yang tepat. Ketika itu di Bangkok,

Pencak Silat Seluruh Indonesia).

Namun ajang kumpul-kumpul tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membahas nama dan lambang partai. Nama partai harus memperlihatkan karakter dan ideologi yang nasionalis dan kerakyatan sebagaimana manifesto Gerindra. Tersebutlah nama "Partai Indonesia Raya". Nama yang sebenarnya tepat, namun sayang pernah digunakan di masa lalu, yakni PIR (Partai Indonesia Raya) dan Parindra. "Kalau begitu pakai kata gerakan, jadi Gerakan Indonesia Raya," ucap Hashim penuh semangat. Peserta rapat pun kemudian menyetujuinya. Selain gampang diucapkan, juga mudah diingat: Gerindra, begitu bila disingkat.

Nah, setelah persoalan nama selesai, tinggal soal lambang. Lambang apa yang layak digunakan? Muncul ide untuk menggunakan burung garuda. Namun, ini lambang yang sudah banyak digunakan partai lain. Apalagi simbol Pancasila yang tergantung di dada garuda, mulai dari bintang, padi kapas, rantai, sampai kepala banteng dan pohon beringin, su-

dah digunakan oleh partai yang ada sekarang.

Untuk menemukan lambang yang tepat, Fadli Zon mengadakan survei kecil-kecilan. Hasilnya, sebagian masyarakat justru menyukai bila Gerindra menggunakan lambang harimau. Harimau adalah binatang yang sangat perkasa dan menggetarkan lawan bila mengaum. Namun, Prabowo memiliki ide lain, yakni kepala burung garuda, ya hanya kepalanya saja. Gagasan itu disampaikan oleh Prabowo sendiri, yang juga diamini oleh pendiri partai yang lain.

Maka jadilah Partai Gerindra yang kita kenal sekarang. Perpaduan antara nama dan lambang yang tepat, sebab keduanya menggambarkan semangat kemandirian, keberanian dan kemakmuran rakyat. Kepala burung garuda yang menghadap ke kanan, melambangkan keberanian dalam bersikap dan bertindak. Sisi di leher berjumlah 17, jengger dan jambul 8 buah, bulu telinga 4 buah, dan bingkai gambar segi lima yang seluruhnya mengandung arti hari kemerdekaan, 17-8-1945. Dalam perjalanannya kemudian, terbukti, Gerindra mendapatkan tempat di hati masyarakat, meski berusia muda. Ketika iklan kampanye genjar dilakukan, burung garuda dan suaranya ikut memberi latar belakang sehingga para penonton merasa terganggu dengan iklan tersebut. ◀ IMAN FIRDAUS



FOTO MUSTAFA KEMAL

Thailand, mereka berkumpul untuk acara Sea Games Desember 2007, demi mendukung tim Indonesia, terutama polo dan pencak silat yang berhasil lolos untuk dipertandingkan di sana. Kebetulan Prabowo adalah ketua IPSI (Ikatan



# Tiga Tahun Bergerak Bersama Rakyat

## GERINDRA TERUS KEDEPANKAN DELAPAN PROGRAM AKSI

Partai Gerindra terus mengedepankan delapan program aksi sebagai program konkret untuk mensejahterakan rakyat. Seluruh delapan program aksi itu memiliki parameter, ukuran, dan target yang jelas.

OLEH BUDI SUCAHYO

**BAYANG-BAYANG** kepak sayap burung Garuda terlihat di daratan. Burung Garuda, lambang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), sedang terbang di udara. Melintasi daratan, ketika orang-orang sedang menjalankan aktivitasnya—bersembahyang di tempat ibadah, bekerja di sawah, belajar, dan lain-lain—diiringi narasi suara Prabowo Subianto yang mengajak untuk bergabung dengan Partai Gerindra.

Tentu kita masih ingat iklan Partai Gerindra yang kerap ditayangkan di berbagai stasiun televisi saat menjelang Pemilu 2009 silam. Kala itu usia Partai Gerindra belum menginjak dua tahun dihitung sejak didirikan pada 6 Februari 2008. Namun, partai ini telah memikat rakyat lewat visi dan misi yang disampaikan iklan partai: ekonomi kerakyatan, membuka lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Berkat iklan yang merakyat dan spesifik itu, popularitas Partai Gerindra meningkat.



FOTO MUSTAFA KEMAL

**OPTIMIS** perolehan suara pada Pemilu 2014 akan meningkat.

akar keIndonesiaan yang berawal dari masyarakat pedesaan sebagai petani dan nelayan.

Alhasil, sebagai sebuah pemain baru yang mengikuti Pemilu untuk pertama kalinya, Partai Gerindra mampu meraih 4.646.406 juta suara atau 4,46%. Dengan persiapan hanya dua sampai tiga bulan, Partai Gerindra bisa melejit ke posisi partai papan tengah. Berada di urutan delapan. Partai Gerindra mengungguli partai yang sebelumnya telah mengikuti Pemilu 2004 seperti Partai

wakil presiden, yaitu Megawati Soekarnoputri (calon presiden dari PDI Perjuangan) dan Prabowo Subianto (calon wakil presiden dari Partai Gerindra). Pasangan capres dan cawapres lainnya dalam Pilpres adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, Jusuf Kalla dan Wiranto. SBY dan Boediono akhirnya menjadi pemenang dalam Pilpres itu.

Meski belum genap berusia dua tahun pada waktu itu, sukses Partai Gerindra cukup membanggakan. Kini, Partai Gerindra memasuki usia

target yang berhasil kita meminta penghapusan BHP (Badan Hukum Pendidikan). Ternyata kita berhasil di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK)," jelas Suhardi. Pada Rabu, 30 Maret 2010, MK membatalkan UU BHP karena tak selaras dengan UUD NRI Tahun 1945.

Dengan tetap mengedepankan delapan program aksi, Partai Gerindra kembali berancang-ancang untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2014. Pengalaman Pemilu 2009 menjadi landasan bagi

Partai Gerindra belum punya banyak kader dan saksi. Tapi, pada Pemilu 2014 mendatang, Partai Gerindra memiliki lebih dari 5 juta saksi. Saat ini tercatat 13 juta pemegang kartu tanda anggota Partai Gerindra.

Karena itu, Partai Gerindra optimis perolehan suara pada Pemilu 2014 akan meningkat. Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, peningkatan jumlah suara Partai Gerindra itu terkait dengan manifesto perjuangan partai yang sangat jelas. "Kami tetap pada ekonomi kerakyatan dan politik yang berpihak pada rakyat," katanya kepada *Gema Indonesia Raya*.

Sedangkan untuk calon presiden, baik Suhardi maupun Fadli Zon memastikan Partai Gerindra tidak akan goyah, yaitu tetap mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2014. "Kami tidak mungkin ditawar soal itu. Apa pun yang terjadi, kami harus mencalonkan Pak Prabowo," kata Suhardi.

Partai Gerindra menjadi satu-satunya partai politik yang berani mengusung calon presiden jauh-jauh hari. Ketika partai politik lain masih menimbang-nimbang dan mencari sosok, Partai Gerindra sudah mengambil keputusan. Begitu pula pada Pemilu 2009, Partai Gerindra menjadi partai paling belakang menentukan capres, sekarang menjadi partai yang paling dahulu menentukan capres.

"Sejak sekarang Partai Gerindra sudah mengusung calon presiden untuk pemilu nanti, yakni Prabowo Subianto. Partai politik lain pun sebaiknya sudah mengusungnya dari sekarang," kata Fadli Zon yang juga Ketua Badan Komunikasi Partai Gerindra ini. Dengan cara ini, maka sejak awal rakyat sudah memiliki pilihan. ◀

**“ Sebagai pemain baru yang mengikuti Pemilu untuk pertama kalinya, Partai Gerindra mampu meraih 4.646.406 juta suara atau 4,46%....**

tiga tahun. Waktu tiga tahun memang terlalu singkat. "Kami mendirikan partai tiga tahun lalu rasanya seperti baru kemarin. Waktu habis untuk verifikasi partai, kampanye, dan melakukan program. Sebagian besar waktu yang ada justru habis untuk proses administrasi," kata Ketua Umum Partai Gerindra, Prof. Dr. Ir. Suhardi, MSc.

### Kedepankan 8 Program Aksi

Selama tiga tahun, Partai Gerindra terus mengedepankan 8 Program Aksi, yaitu menjadwalkan kembali pembayaran utang, menyelamatkan kekayaan negara untuk menghilangkan kemiskinan, melaksanakan ekonomi kerakyatan, delapan program desa, memperkuat sektor usaha kecil, kemandirian energi, pendidikan dan kesehatan, menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Menurut Suhardi, delapan program aksi tersebut merupakan program konkret untuk mensejahterakan rakyat. Seluruh delapan program aksi itu memiliki parameter, ukuran, dan target yang jelas. "Salah satu

partai ini untuk mendongkrak suara pada Pemilu 2014. Langkah yang ditempuh adalah melakukan konsolidasi di semua lini untuk menguatkan misi partai.

Menurut Suhardi, Pemilu 2014 merupakan waktu yang singkat terutama untuk persiapan. Salah satunya verifikasi partai politik peserta pemilu. "Bagi kami sebenarnya aneh. Masak partai yang sudah ikut pemilu harus diverifikasi. Tapi kami sudah siap," ujarnya kepada Iman Firdaus dari *Gema Indonesia Raya* dalam wawancara telepon, Jumat 4 Februari 2011.

Kesiapan itu diwujudkan dengan memenuhi target sebagaimana syarat verifikasi, yaitu DPD di 33 provinsi dan 75% di tingkat kabupaten kota. "Seluruh kader Partai Gerindra siap untuk menghidupkan kantor DPD tingkat kabupaten kota," kata guru besar kehutanan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.

Bahkan, kader-kader militan Partai Gerindra diperkirakan bisa mendongkrak perolehan suara partai pada Pemilu 2014. Ketika awal berdiri, dalam waktu satu tahun ku-



FOTO MUSTAFA KEMAL

**VERIFIKASI & ADMINISTRASI** Partai Gerindra di KPU tahun 2008.

Dengan kampanye itu sebenarnya Partai Gerindra telah membuat sebuah gebrakan baru. Partai yang mendukung Prabowo Subianto, Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), sebagai Ketua Dewan Pembina berupaya merangkul petani dan nelayan. Seperti terlihat dalam iklannya, Partai Gerindra mencoba mengembalikan dan menyadarkan kembali

Bulan Bintang (PBB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Bintang Reformasi (PBR). Dengan hasil itu, Partai Gerindra memperoleh sebanyak 26 kursi di DPR.

Tidak hanya itu. Dalam pemilihan umum presiden (Pilpres), Partai Gerindra berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Koalisi menghasilkan pasangan calon presiden dan



MESKI PIMPINAN DPR NGOTOT

# Partai Gerindra Tetap Tolak Gedung Baru DPR



FOTO TRI SUSILO

Gerindra tetap menunjukkan sikapnya menolak pembangunan gedung baru DPR. Dana untuk jaminan kesehatan 22 juta rakyat miskin lebih prioritas daripada gedung DPR.

OLEH ARDI WINANGUN

**BERMULA** dari Partai Gerindra dan Fraksi Gerindra di DPR dalam pernyataan yang disampaikan pada 11 Januari 2011, kini isu penolakan pembangunan gedung baru DPR bergulir deras. Terakhir Presiden SBY pun ikut berbicara mengenai pantas tidaknya DPR membangun gedung baru yang dirancang di luar kepatutan itu.

"Bila tidak ada kepentingan mendesak untuk membangun atau menambahkan lagi fasilitas baru di gedung yang lama, maka pembangunan itu tidak diperlukan," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, 7 April 2011, menyikapi pro kontranya pembangunan gedung DPR tersebut.

Pada kesempatan itu SBY memberi sinyal agar rencana pembangunan gedung dan fasilitas yang tidak memenuhi standar kepatutan agar ditunda, untuk dilakukan revisi, penyesuaian. Namun, pimpinan DPR agaknya sudah tuli atau berpura-pura tuli menganggap anjuran SBY dan aspirasi rakyat yang menghendaki pembangunan gedung DPR itu dibatalkan dianggap angin lalu.

Dengan berpegang pada hasil rapat konsultasi pimpinan DPR dengan para pimpinan fraksi yang berlangsung Kamis, 7 April 2011, pimpinan DPR memutuskan untuk tetap melanjutkan pembangunan gedung DPR yang menelan uang rakyat lebih Rp 1,1 triliun itu.

Keputusan ini diambil dengan alasan, mayoritas fraksi menyetujui pembangunan gedung DPR tersebut. Dari sembilan fraksi yang ada di DPR, hanya fraksi Gerindra tetap pada sikapnya, menolak pembangunan gedung DPR, dan satu lagi

yang menolak adalah fraksi PAN.

Sikap Partai Gerindra ini telah dijelaskan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dalam pertemuan pers di Press Room MPR/DPR pertengahan Januari 2011. Dalam penjelasannya, Fadli Zon mengatakan, Partai Gerindra telah menyampaikan pemolakannya kepada pimpinan DPR lewat surat pada 1 Oktober 2010. Jadi, tidak benar apa yang dikatakan pimpinan DPR bahwa semua fraksi setuju pembangunan gedung DPR.

Fadli Zon – yang saat jumpa pers itu didampingi anggota DPR Ahmad Muzani, Supriyanto, Nuroji, dan pengurus DPP Partai Gerindra Asrian Mirza – memaparkan alasan Gerindra menolak rencana itu. Karena, dana untuk membangun gedung baru sebesar Rp 1,13 triliun itu sama saja dengan memberi jatah uang sebesar Rp 2,2 miliar untuk satu anggota dewan.

Dana sebesar itu, menurut Fadli Zon, lebih baik digunakan buat Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk 22 juta rakyat miskin, pembangunan 12 ribu gedung sekolah baru, atau membangun 22 ribu rumah baru untuk 22 ribu kepala keluarga miskin. Atau, semakin terasa manfaatnya bila uang itu dialokasikan untuk membeli komoditas petani dengan harga layak saat musim panen, dan peningkatan ketersediaan pupuk saat musim tanam.

Penolakan itu diikuti pula dengan gugatan *citizen law suit* terhadap institusi DPR ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan dilakukan oleh Laskar Gerindra (Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya) selaku kuasa hukum 33 orang dari 33

provinsi di Indonesia. Pihak yang tergugat adalah institusi DPR, Ketua DPR RI Marzuki Alie, dan anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI selaku pihak yang menyetujui pembangunan gedung baru DPR.

Menurut Ketua Laskar Gerindra, Habiburrokhman, gugatan ini dimaksudkan agar DPR RI membatalkan rencana pembangunan gedung baru. Dalam gugatan itu juga diajukan permohonan provisi agar selama proses hukum berjalan, proses pembangunan gedung baru ditunda.

Sejumlah politisi lintas partai juga menolak pembangunan gedung DPR. Mereka adalah Budiman Sudjatmiko (PDI Perjuangan), Malik Haramain (PKB), dan Roy Suryo (PD), Teguh Juarno (PAN), Hasrul Azwar (PPP), Romahurmuzy (PPP), Hendra Singkaru (PAN), Eva Kusuma Sundari (PDI

Perjuangan), Gita KDI (PKB).

"Pembangunan gedung DPR merupakan langkah tidak arif karena kontradiktif dengan realitas sosial yang serba sulit sekaligus menunjukkan DPR tidak memiliki empati terhadap penderitaan rakyat," ujar Budiman Sudjatmiko.

## Mengapa Perlu Ditolak

Gedung baru DPR itu rencananya berlantai 36 dibangun di sebelah selatan Gedung Nusantara I sekarang. Di sini nanti setiap anggota DPR mendapat jatah ruangan yang luasnya mendekati luas ruang kerja pejabat eselon satu. Berdasarkan petunjuk buku biru Kementerian Pekerjaan Umum, luas ruangan pejabat eselon ditentukan 194 meter persegi, namun untuk anggota DPR kelak hanya memperoleh 120 meter persegi per anggota. Itu artinya, luasnya hampir tiga kali lebih luas dari ruang kerja mereka sekarang, yang hanya 32 meter persegi.

Sekretaris Jenderal DPR RI Nining Indra Saleh punya alasan kenapa gedung DPR itu perlu dibangun. Selain telah direncanakan sejak lama (2008), juga karena kondisi Gedung Nusantara I -- yang kini tempat berkantor anggota dewan -- dinilai sudah tidak memadai lagi. Gedung itu sekarang, katanya, dihuni oleh 2500 orang anggota DPR bersama stafnya, padahal kapasitas gedung yang telah berusia 13 tahun itu hanya 800 orang. Jadi, jelasnya, sudah *overload*.



FOTO ISTIMEWA

**GEDUNG BARU DPR RI** menikmati kenyamanan di atas penderitaan rakyat

**PERNYATAAN** sikap Partai Gerindra terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR RI, adalah sebagai berikut:

1. Menolak rencana pembangunan gedung DPR karena menghamburkan uang rakyat, pengkhianatan pada amanat rakyat, dan mencederai rasa keadilan rakyat Indonesia;
2. Fraksi Gerindra DPR RI secara tegas menolak rencana pembangunan gedung baru DPR melalui surat yang telah disampaikan resmi kepada pimpinan DPR RI. Karenanya klaim semua fraksi mendukung rencana tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR baru-baru ini adalah tidak benar dan merupakan pembohongan publik;
3. Mendesak agar dana pembangunan gedung baru DPR yang telah dianggarkan untuk dialihkan menjalankan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat;
4. Menginstruksikan kepada Fraksi Gerindra DPR RI dan para anggotanya untuk terus konsisten memperjuangkan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, mengurangi pemborosan dan kebocoran anggaran negara dan jangan khianati serta cederai amanat rakyat. ◀

Apalagi nantinya ada penambahan staf ahli dari semula dua orang menjadi lima orang untuk setiap anggota dewan. Maka, "Ke depan, dengan luas dan jumlah ruangan yang tersedia saat ini, sudah tentu tidak akan mencukupi," ujar Nining memberi alasan. Agaknya, Nining ingin mengatakan bahwa pembangunan gedung DPR itu sudah merupakan keharusan dan tak bisa ditunda-tunda lagi. Dan, gedung baru ini dirancang untuk 600 anggota DPR.

Namun yang patut dipertanyakan bahwa gedung baru itu juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang, seperti kolam renang, *gymnasium*, spa, café dan fasilitas lainnya yang akan memanjakan para anggota DPR terhormat. Untuk membangun gedung itu membutuhkan anggaran di atas Rp 1 triliun, suatu angka fantastis untuk negara Indonesia yang angka kemiskinan dan penganggurannya masih cukup tinggi.

Dengan fasilitas itu sudah dapat dibayangkan anggota DPR nantinya akan menikmati kenyamanan bekerja, namun apakah itu akan mendongkrak kinerja masih dipertanyakan. Sebagai gambaran, untuk periode 2009-2014 menunjukkan bahwa produktivitas lembaga legislatif ini cukup mengecewakan. Dari 70 RUU yang ditargetkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010, DPR hanya mampu menyelesaikan lima RUU menjadi undang-undang.

Kinerja DPR periode 2009-2011 mungkin tidak lebih baik dibanding DPR periode sebelumnya (2004-2009), dilihat dari penyelesaian target RUU. DPR pada periode 2004-2009 hanya mampu menyelesaikan 190 RUU menjadi UU dari target prolegnas sebanyak 284 RUU.

Menurut evaluasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), hingga September 2010, DPR periode sekarang hanya dapat menyelesaikan 8 RUU dari target 70 RUU yang ditetapkan Prolegnas 2010. Adakah rendahnya kinerja anggota DPR ini disebabkan oleh ruang kerja yang tak memadai? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. ◀





dengan cara-cara kotor. “Gerindra bukan tempat bagi politisi hina,” tegas Prabowo.

Mereka yang mau menerima amplop atau mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat, menurut Prabowo, tidak layak berada dalam perahu Gerindra. Prabowo memperingatkan, seluruh politisi Gerindra tidak diperkenankan mencari kekayaan pribadi. “Keinginan memperkaya diri sendiri bertentangan dengan nafas Gerindra,” tandas Prabowo.

Prabowo yang juga Ketua Umum HKTI ini menegaskan, ia ingin partai baru yang bernama Gerindra menjadi menjadi partai baik dan bersih, membela kepentingan rakyat, serta mengubah dan memperbaiki nasib rakyat.

“Jangan lupa siapa yang mengantarkan Anda ke DPR, jangan lupa siapa yang memberi mandat Anda. Karena Anda bekerja atas nama Gerindra, maka terus berjuang untuk

kemiskinan. Harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan, dan pengangguran mudah ditemukan di mana-mana.

Selama tiga tahun perjalanannya, kata Prabowo, Gerindra banyak menghadapi tantangan dan kenangan, pengalaman serta pelajaran. Karena itu, seluruh kader dan simpatisan Gerindra harus bisa memetik pelajaran dari perjalanan tersebut. Sekaligus melakukan introspeksi, untuk memperbaiki langkah dan strategi perjuangan partai. “Itu diperlukan, agar kader-kader Gerindra lebih kuat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

Sejarah akan mencatat bahwa Gerindra berada di tengah-tengah rakyat. “Lebih baik hancur bersama rakyat, daripada makmur tapi meninggalkan rakyat,” tegas Prabowo.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Suhardi, dalam sambutannya mengatakan,

# Partai Gerindra Selalu Bersama Rakyat

**PRABOWO: JANGAN MAU DISOGOK DAN TERUSLAH BERJUANG UNTUK RAKYAT...**

“Lebih baik hancur bersama rakyat, dari pada makmur tapi meninggalkan rakyat,” kata Prabowo saat memberikan sambutan pada perayaan HUT Gerindra.

OLEH M. BUDIONO

**PERAYAAN** ulang tahun ke-3 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berlangsung khidmat dan sederhana, Sabtu (5/2). Acara ditandai dengan pemotongan tumpeng, pementasan wayang kulit dan kepindahan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, dari Jl. Brawijaya IX No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ke Jl. Harsono RM No 54, Ragunan, Jakarta Selatan.

Pemotongan tumpeng dilakukan oleh Ketua Dewan Pembina

Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan potongan tumpeng itu lalu diserahkan kepada tiga sosok penting partai, masing-masing Hashim Djojohadikusumo (anggota Dewan Pembina Gerindra); Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc. (Ketua Umum DPP Gerindra); dan H.M. Taufik (Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta).

Dalam sambutan menyambut ulang tahun Partai Gerindra, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengingatkan seluruh kader dan partisan Gerin-

dra akan tujuan partai. “Gerindra berdiri dengan tujuan membela kepentingan rakyat dan menjaga tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menegakkan keadilan dan kebenaran,” tandasnya.

Kepada seluruh kader Gerindra yang duduk di legislatif, mulai dari pusat hingga daerah, Prabowo meminta agar memperjuangkan cita-cita partai. Prabowo juga meminta agar mewaspadaai keinginan kelompok tertentu yang berusaha mendapatkan keuntungan pribadi



rakyat dan jangan mau disogok,” kata Prabowo disambut tepuk dan teriakan hidup Prabowo.

Kesederhanaan dalam perayaan ulang tahun ke-3 Gerindra, menurut Prabowo, merupakan salah satu bentuk kepedulian partai terhadap kesulitan hidup rakyat. Karena saat ini, masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis

kantor baru Gerindra harus bisa menumbuhkan semangat baru bagi kader dan simpatisan partai. Apalagi, posisi kantor ini sangat strategis, mudah dijangkau dan memiliki berbagai fasilitas. Ke depan, Suhardi berharap, tidak ada lagi alasan terlambat mengikuti rapat, karena macet. ◀

FOTO-FOTO: MUSTAFA KEMAL

## Kantor GERINDRA “Diserbu” Puluhan Ribu Penggemar

**ACARA** kemudian dilanjutkan pementasan wayang kulit dengan dalang Ki Enthus Soesmono. “Bima Bungkus” lakon yang ditampilkan malam itu menceritakan tentang kisah perjalanan Bima, putra Raja Hastina Pura, Pandu. Dikisahkan, sebelum Bima lahir terjadi banyak keanehan, antara lain, adanya seekor gajah melakukan semedi agar bisa berubah wujud jadi manusia.

Puluhan ribu pasang mata tumpah ruah di halaman kantor baru DPP Partai Gerindra di Ragunan tersebut, sehingga menyebabkan lalu lintas di kawasan itu tersendat. Selain itu, ratusan pedagang kaki lima --seperti pedagang minuman, pakaian, rokok, souvenir dan lainnya -- mengais rejeki sembari menyaksikan ki dalang Enthus, yang juga dikenal dengan

sebutan dalang edan, beraksi.

Malam kian larut, penonton semakin menyemut dan cenderung sedikit semrawut. Lantaran ratusan mobil dan sepeda motor parkir di ruas badan Jl. Harsono RM. Namun demikian, pagelaran wayang kulit malam itu telah mengobati kerinduan penggemar wayang kulit. Soalnya, pementasan kesenian tradisional Jawa ini semakin jarang ditemukan, khusus di Jakarta.

“Baru kali ini saya bisa nonton wayang dan dapat makanan enak secara gratis,” kata Sukirman, warga Jogja yang bertempat tinggal di Pasar Minggu, Jakarta, yang malam itu ikut larut di antara ribuan penonton. Hanya satu harapan Sukirman, sering-seringlah Partai Gerindra menggelar acara wayangan ini. ◀





# Berfusi ke Partai Gerindra

## SEBUAH KESADARAN UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN

Dengan berfusnya sejumlah partai ke dalam partai Gerindra, maka di atas kertas tak tertutup kemungkinan partai berlambang kepala burung Garuda ini akan tampil sebagai kekuatan alternatif dalam pemilu 2014.

OLEH ARDI WINANGUN



FOTO: MUSTAFA KEMAL

**PARTAI** Bintang Reformasi (PBR) resmi berfusi dengan partai Gerindra. Dalam sebuah acara yang berlangsung di Puri Ratna Room, Hotel Sahid, Jakarta, 18 Februari 2011, Ketua Umum PBR Bursah Zarnubi dan Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi dengan disaksikan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menandatangani berita acara bergabungnya PBR ke partai berlambang burung Garuda tersebut.

Dengan adanya kesepakatan fusi ini maka konstituen PBR di akar rumput sudah semestinya mengikuti garis yang telah ditetapkan oleh pucuk pimpinannya guna memperkuat basis massa partai Gerindra. Untuk selanjutnya adalah tugas kader partai pecahan PPP ini untuk mensosialisasikan fusi ini ke konstituen dan basis massa partai PBR yang tersebar di seluruh Indonesia.

PBR bukanlah partai politik pertama yang menyatakan bergabung dengan partai Gerindra. Sebelumnya, 31 Oktober 2010, enam (6) parpol yang menamakan dirinya Poros Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) menyatakan bergabung dengan Gerindra. Ke-enam parpol itu adalah: Partai Merdeka, Partai Buruh, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNU), PNI Massa Marhaenis, Partai Kedaulatan, dan Partai Serikat Indonesia. Dan, besar kemungkinan Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI), juga segera mengikuti jejak PBR dan enam partai tersebut.

Bila fusi ini berjalan sebagai mestinya – artinya berjalan dari hulu hingga hilir -- maka akan menambah amunisi bagi partai Gerin-

dra dalam pemilu 2014. Menurut perhitungan di atas kertas – yakni berdasarkan perolehan suara pada pemilu 2009 – bila basis massa yang ada di gerbong partai-partai yang tidak lolos *parliamentary threshold* ini ditambah basis massa Gerindra, maka partai ini bisa meraup suara minimal 10% pada pemilu 2014. Itu artinya, Gerindra akan tampil menjadi partai alternatif yang bisa memenangi pemilu.

“Dengan bersatunya PBR dan partai-partai lainnya ke dalam partai Gerindra, maka akan terbangun sebuah kekuatan alternatif,” ujar Bursah Zarnubi. Dari kekuatan alternatif ini, kata Bursah lebih lanjut, akan muncul pula pemimpin alternatif. Pemimpin alternatif yang dimaksud tak lain adalah Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Bahkan, Bursah menyebutkan bahwa ada kesamaan antara Prabowo Subianto dengan proklamator Indonesia, Bung Karno. Kedua pemimpin ini, menurut Bursah, merupakan tipe pemimpin yang berbasis nilai-nilai Indonesia, bukan pemimpin yang berbasis nilai-nilai Barat. “Kita perlu pemimpin yang berani menantang imperialisme,” tambahnya. Seperti diketahui Proklamator Indonesia, Bung Karno, dikenal sebagai pemimpin Indonesia yang berani menentang kolonialisme dan imperialisme.

**“Bergabungnya Anda ke Gerindra merupakan suntikan yang sangat besar dan sangat berarti...”**

—PRABOWO SUBIANTO—

Bursah mengakui telah mengikuti beberapa survei guna mengetahui siapa calon Presiden Republik Indonesia yang bakal maju pada pemilu mendatang. Selama empat kali mengikuti survei-survei itu secara cermat, Bursah punya keyakinan bahwa Prabowo Subianto akan menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang.

nesia yang ikut menyaksikan acara fusi itu, agar mensosialisasikan kesepakatan itu ke seluruh kader PBR di masing-masing provinsi. “Beri tahu kepada seluruh masyarakat bahwa PBR sudah bergabung ke dalam Partai Gerindra, dan untuk para ketua DPP PBR telah disiapakan jaket partai Gerindra,” kata Bursah sembari tersenyum.



DEKLARASI bergabungnya enam partai dengan Partai Gerindra di Sentul Jawa Barat

FOTO: MUSTAFA KEMAL

Untuk itu, Bursah berpesan kepada seluruh Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PBR se-Indo-

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam sambutannya menyatakan, fusi PBR ke Partai Gerindra sudah melalui pembicaraan yang cukup lama. “Proses penandatanganan fusi ini diibaratkan seperti akad nikah dan resepsinya diadakan pada Mei 2011,” ucap Prabowo Subianto.

Pada bulan itulah, menurut Pra-

bowo, Partai Gerindra dan partai-partai politik yang telah berfusi ke dalam Partai Gerindra akan mengadakan konsolidasi besar-besaran. Konsolidasi ini perlu, karena jumlah para wakil rakyat dari PBR dan Partai Gerindra, baik di DPRD II, DPRD I, dan DPR, bisa mencapai 1461 orang. Belum lagi ditambah para pengurus dari seluruh Indonesia dari tingkat kabupaten hingga pusat.

Menurut Prabowo, berfusnya PBR ke Partai Gerindra merupakan sebuah kesadaran untuk melakukan perubahan. “Bergabungnya Anda ke Gerindra merupakan suntikan yang sangat besar dan sangat berarti,” ucapnya. Dan, setelah fusi ini, kepanjangan dari PBR menjadi Petani Buruh Reformasi. Selain itu, kata Prabowo, Ketua Umum PBR Bursah Zarnubi otomatis menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra.

Prabowo menegaskan bahwa saat ini muncul kekurangpercayaan pada elit kekuasaan. Apa sebab? Mereka mengatakan berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Padahal kenyataan menunjukkan bahwa di atas kertas memang ada pertumbuhan, tapi Bank Dunia berkata lain bahwa separo dari rakyat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. “Untuk itu harus ada kekuatan yang berani mengoreksi kekuasaan,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menyinggung terjadinya kerusuhan yang berlatarbelakang agama akhir-akhir ini. Peristiwa itu terjadi, tandas Prabowo, akibat lemahnya penegakan hukum. Sedangkan penegakan hukum lemah karena elit politik suka akal-akalan, terlalu banyak bermain dan

tidak jujur. “Dan, tak satunya kata dengan perbuatan,” ujarnya.

Dalam kondisi demikian, Prabowo menegaskan bahwa Partai Gerindra harus memberikan alternatif. “Hai, Rakyat Indonesia bila engkau ingin menjadi terhormat, mari memilih kekuatan yang bersih dan mengerti arah pembangunan,” tegasnya. Dan, itu ada pada Partai Gerindra. ◀



# Sikap Gerindra, Bukan Oportunis

Fraksi Partai Gerindra menolak hak angket mafia pajak bukan melindungi mafia. Tapi khawatir ditunggangi kepentingan politik.

OLEH IMAN FIRDAUS



**MAFIA PAJAK:** Suasana kemenangan ketika berlangsungnya Voting Rapat Paripurna DPR-RI, mengenai hak angket mafia pajak.

**SIDANG** paripurna dengan agenda hak angket mafia pajak berjalan alot, pertengahan Pebruari 2011. Sejak pagi hingga malam, para anggota dewan tetap setia mengikuti acara hingga usai. Bahkan dua anggota Fraksi Partai Demokrat harus didorong dengan menggunakan kursi roda berikut tabung oksigen. Meski dalam keadaan lemah keduanya wajib hadir untuk menggenapkan suara saat voting dilakukan.

Adalah Theresia Pardede, satu dari dua anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang terpaksa harus hadir tersebut, meski dia sedang menderita sakit tenggorokan. "Harus hadir, ini menyangkut voting yang tidak boleh kehilangan suara," katanya dengan suara serak dan nyaris tidak terdengar.

Maklum, hari itu menjadi hari penentuan apakah hak angket mafia pajak akan terus melaju atau terhenti. Hasilnya seperti sudah diketahui bersama, setelah lobi berjam-jam dilakukan pimpinan DPR namun tetap juga tidak menghasilkan kata sepakat alias *deadlock*, dan akhirnya pengambilan keputusan ditempuh melalui mekanisme voting.

"Mekanismenya voting. Rapat *deadlock*," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat keluar dari ruang lobi. Suasana lobi digambarkan oleh Taufik sangat alot. Dua kelompok yang mendukung dan yang menolak Pansus Angket Perpajakan tetap tak ada yang mau mengalah kalah dan tetap pada pilihan masing-masing.

Kelompok yang menolak Pan-

sus Perpajakan adalah Fraksi Demokrat, PKB, PPP, PAN dan Gerindra. Sedangkan Fraksi yang mendukung Pansus Perpajakan masing-masing Golkar, PDIP dan Hanura. Kedua kelompok memiliki argumen masing-masing yang sulit untuk dipertemukan.

Ketua DPR Marzuki Alie yang memimpin rapat langsung memerintahkan pihak Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mempersiapkan voting segera setelah membuka kembali sidang setelah skorsing. Setiap fraksi diminta mengirinkan perwakilan untuk mengawasi jalannya penghitungan suara. Jumlah anggota setiap fraksi yang hadir dihitung dan kemudian diminta berdiri. Kepada yang tidak setuju dengan hak angket perpajakan diminta duduk,

sedangkan anggota fraksi yang setuju tetap diminta berdiri.

Pemungutan suara diawali Fraksi Partai Demokrat, dan 145 anggota fraksi yang hadir, kesemuanya menyatakan menolak hak angket. Lalu, diteruskan Fraksi Partai Golkar, dari 106 anggota yang hadir seluruhnya menyatakan mendukung hak angket.

Fraksi PDIP dengan 84 anggotanya kompak menyatakan menerima usulan hak angket. Demikian juga dengan 56 anggota Fraksi PKS. Sementara Fraksi PAN, 43 anggotanya bulat menyatakan menolak. Selanjutnya 26 anggota Fraksi PPP juga sepakat menolak. Lily Wahid dan Efendy Choirie dari Fraksi PKB mendapat tepuk tangan meriah, karena mengambil sikap yang berbeda dengan dengan fraksinya. Lily Wahid dan Effendy Choirie dengan penuh keyakinan menerima hak angket, sementara 26 anggota PKB yang lain mengikuti garis yang ditetapkan fraksinya, menolak hak angket.

Sedangkan Fraksi Partai Gerindra adalah fraksi penentu dalam voting ini alias menjadi gong dalam pemungutan suara tersebut. Fraksi Gerindra yang berjumlah 26 anggota secara bulat tetap konsisten dengan sikapnya, yaitu menolak hak angket. Sedangkan Fraksi Partai Hanura, dengan jumlah anggota 16 orang mengikuti jejak Fraksi Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan menolak hak angket.

Melalui mekanisme voting yang cukup dramatis ini, satu keputusan telah ditetapkan: hak angket mafia pajak ditolak, dengan selisih 2 (dua) suara. "Kita telah melakukan voting. Dari 530 anggota yang hadir, 264 menerima hak angket perpajakan, sedangkan 266 anggota menolak. Dengan demikian usulan hak angket DPR RI tentang perpajakan ditolak, terima kasih," kata Marzuki Alie menutup sidang paripurna.

Marzuki memuji sikap Gerindra yang cukup rasional dan cerdas. "Saya mendengar dari Ketua DPP Partai Gerindra, pemerintah ini harus sukses, pemerintah ini harus didukung sampai tahun 2014. Jangan partai kita menghambat jalannya

pemerintahan," ujar Marzuki Alie dengan berbinar-binar.

Fraksi Gerindra, kata Marzuki, memang sangat kritis. Namun, makakala suatu hal dinilai akan membuat gaduh perpolitikan nasional dan akan menghambat jalannya program-program pemerintah, tentu tidak akan didukung oleh Gerindra.

"Baik yang di dalam dan di luar sama-sama ingin membangun bangsa ini, cuma cara-caranya saja yang berbeda. Yang di dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka mendukung Presiden SBY dari Pemilu 2009 lalu sampai 2014 untuk memenuhi janji-janji kampanye. Namun, kita menghargai sikap dari partai-partai yang ingin berada di luar pemerintah yang kita memang perlukan sebagai partai yang mengkritisi kebijakan yang dilakukan pemerintah," papar Marzuki.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat menjelaskan, ada persepsi keliru dari masyarakat atas keputusan paripurna DPR yang menolak penggunaan hak angket perpajakan. Ia mengharapkan, Pimpinan DPR meluruskannya. "Berikan penjelasan kepada masyarakat kita bahwa DPR, lembaga kita ini, tidak melindungi mafia pajak," kata Martin.

Menurut Martin, pasca keputusan paripurna tersebut, ratusan pesan singkat masuk ke telepon genggamnya. Isinya cenderung mengkritik dan menyayangkan langkah fraksinya yang menolak hak angket perpajakan. "Sungguh disayangkan, Gerindra balik arah melindungi mafia pajak," ucap Martin membacakan salah satu pesan dari konstituentnya.

Padahal, Martin lebih lanjut menjelaskan, langkah Gerindra jelas, yakni tak ingin angket perpajakan hanya menjadi panggung politik dan melindungi kepentingan personal. "Kita semua tentunya setuju ada pembenahan sistem perpajakan dan menangkap mafia-mafianya. Tapi bukan untuk bargain politik. Apa yang kita dapatkan dari angket Century, coba?," tanya ucap anggota Komisi III ini. ◀

## PEMILUKADA SULAWESI TENGAH

# Pasangan Longki Djanggola-Sudarto Menang Mutlak

Kader Partai Gerindra berjaya dalam pemilukada di Sulawesi Tengah. Longki Djanggola berpasangan dengan Sudarto meraih lebih dari 50% suara pemilih.

**INILAH** kader Partai Gerindra yang pertama berhasil meraih kemenangan dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) tingkat provinsi di Indonesia. Dia adalah Longki Djanggola, 59 tahun, Ketua DPD Gerindra Sulawesi Tengah, menang mutlak dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah yang berlangsung Rabu, 6 April 2011 dengan meraih suara lebih dari 50% -- berdasarkan penghitungan cepat yang dilakukan tiga lembaga survei.

Menurut penghitungan cepat yang dilakukan oleh *Indonesia Development Engineering Consultant* (IDE-C), Longki Djanggola yang berpasangan dengan Sudarto meraih 55% suara. Lalu, penghitungan cepat dilakukan Script Survei Indonesia (SSI) menghasilkan 59,38% suara untuk kemenangan pasangan

Longki-Sudarto. Sementara Lingkaran Survei Indonesia (LSI) juga menempatkan pasangan Longki-Sudarto sebagai pemenang dengan 53,98%.

Pemilukada di Sulawesi Tengah ini diikuti lima pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, termasuk pasangan calon *incumbent* H.B. Paliudju yang kali ini mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur. Dengan kemenangan ini maka pasangan Longki - Sudarto akan segera menggantikan H.B. Paludju dan Achmad Yahya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur yang masa jabatannya telah berakhir 24 Maret 2011.

Longki Djanggola yang lahir pada 11 November 1952 ini merupakan anak ke-enam dari delapan bersaudara dari pasangan suami istri H. Daeng Lando Yoto Djanggola dan



Hj. Aminah Sasung Manopo. Ia menamatkan pendidikan SD dan SLTP di Palu. Setelah itu, ia melanjutkan ke Sekolah Asisten Apoteker (SAA) Negeri di Ujungpandang (sekarang Makassar).

Setelah menamatkan SAA Negeri pada 1971, Longki kembali ke daerahnya (Sulawesi Tengah), dan mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan II. Tapi, semangatnya untuk meraih jenjang karier yang lebih tinggi lagi tampaknya terus menyala. Longki kemudian mengikuti kuliah di Jurusan Farmasi dan Apoteker, Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia. Sedangkan predikat doctor yang ia sandang diperoleh dari Jurusan Administrasi Publik, Fisip, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Selamat bertugas sebagai Gubernur Sulawesi Tengah yang baru untuk Longki Djanggola. Rakyat Sulawesi Tengah menanti karyamu. ◀ **M. BUDIONO**





**MAYORITAS** rakyat Indonesia adalah petani, tetapi anggaran untuk pertanian selalu kecil.

FOTO MUSTAFA KEMAL

# APBN 2011

## Tidak Pro Rakyat

Kebijakan anggaran nasional tidak pernah mengabdikan pada kepentingan rakyat seperti yang selama ini dicita-citakan untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pembangunan ekonomi.

OLEH BUDI SUCAHYO

**ANGGARAN** yang selama ini disajikan secara seremonial setiap tahun tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Seperti ada pembiaran terhadap mayoritas rakyat yang hidup di daerah-daerah, wilayah tertinggal, dan pulau-pulau terluar. Kebijakan anggaran nasional tidak pro rakyat seperti yang dicita-citakan untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.

Indikasi anggaran yang tidak pro-rakyat itu terlihat dari alokasi anggaran untuk, misalnya Kementerian Pertanian. Dalam APBN 2011, Kementerian Pertanian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp16,8 triliun. Anggaran sebesar itu masih ditambah dengan anggaran untuk subsidi pupuk, subsidi benih, dan subsidi program yang jumlahnya sekitar Rp32 triliun.

"Padahal, mayoritas rakyat kita adalah petani. Tapi, kenapa anggaran untuk pertanian hanya sebesar itu," ujar Sadar Subagyo, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, kepada *Gema Indonesia Raya*, Selasa 8 Februari 2011 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta.

Sektor pertanian saat ini sama-

kin mengecil, sementara dengan jumlah petani makin sedikit namun harus menghidupi banyak orang. Anggaran yang pro-rakyat, lanjut Sadar Subagyo, harus bisa menaikkan kredit program. "Pro-rakyat itu kalau bisa menaikkan kehidupan rakyat dari miskin menjadi tidak miskin, dari tidak bekerja menjadi bekerja. Itulah anggaran yang pro-rakyat," jelasnya.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Fary Djemi Francis, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra. Berdasarkan data, Kementerian Daerah Tertinggal mendapat alokasi dana sebesar Rp1,185 triliun. Dana sebesar itu untuk 183 daerah tertinggal. Sementara anggaran untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, sebesar Rp1,2 triliun. Padahal, dana itu hanya untuk mengurus penduduk yang jumlahnya tidak lebih dari satu kabupaten.

"Persoalannya, dimana kebijakan kita pada percepatan daerah tertinggal yang berkaitan dengan kemiskinan," kata Fary Djemi Francis, kepada *Gema Indonesia Raya*, Selasa, 8 Februari 2011. Begitu pun

anggaran Kementerian Perumahan Rakyat sebesar Rp1,7 triliun, tidak sampai satu persen dari total APBN 2011, padahal programnya langsung menyentuh rakyat.

Besarnya anggaran untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo juga menjadi sorotan Sadar Subagyo. Dia membandingkan dengan anggaran untuk BNP2TKI sebesar Rp246 miliar. Padahal BNP2TKI mengurus sekitar 2 juta lebih Tenaga Kerja Indonesia (TKI). "Apakah itu pro-rakyat?" tanya Sadar Subagyo.

Menurut Sadar Subagyo, dana penanggulangan lumpur memang untuk rakyat. Namun penyebabnya adalah swasta. Itu artinya pro pengusaha. Sementara banyak TKI

yang diperlakukan semena-mena namun tak ada pembelaan karena tidak ada anggarannya. "Pemerintah tidak memiliki nurani dan hanya untuk pencitraan saja," ujarnya lagi.

### Mengubah Proses Penganggaran

Sadar Subagyo menambahkan, agar bisa pro-rakyat maka proses penganggaran mesti diubah. Selama proses penganggaran seperti selama ini maka anggaran tidak akan pro-rakyat. Proses anggaran berjalan selama ini, pemerintah mengajukan anggaran dan DPR menyetujui. Tugas DPR hanya sebagai eliminator dalam politik anggaran yang diajukan oleh pemerintah. Akibatnya, anggaran lebih berat ke pusat dibanding ke daerah.

Seharusnya, kata Sadar Subagyo, parlemen bisa menentukan alokasi anggaran berbasis kepentingan rakyat yang diwakilinya. "Seharusnya pemerintah dan parlemen memiliki sistem penganggaran masing-masing yang dipertemukan dalam pembahasan APBN," ujarnya.

Dengan sistem tersebut, pemerintah menganggarkan kebutuhan pemerintah pusat, sedangkan DPR menganggarkan kebutuhan daerah. Tidak seperti saat ini, hanya 30% dari Rp1.200 triliun total APBN 2011 yang dianggarkan untuk daerah. Sisanya untuk belanja pemerintah pusat. "Selama prosesnya seperti itu, anggaran akan berat ke pusat. Anggaran tidak mungkin

pro-rakyat," katanya lagi.

Dia menjelaskan, sudah waktunya anggaran APBN diarahkan untuk kepentingan-kepentingan daerah-daerah. "Untuk pro-rakyat, mau tidak mau, harus pro-daerah. Namun, perubahan itu membutuhkan keberanian politik. Perubahan proses itu membutuhkan keberanian pemimpin nasional," ucapnya.

Sependapat dengan itu, Fary Djemi Francis juga mengatakan setiap tahun anggaran selalu bertambah. Sejak tahun 2005 yang masih Rp500 triliun, kemudian naik menjadi Rp600 triliun, lalu naik lagi menjadi Rp700 triliun, kemudian Rp900 triliun, sampai tahun 2011 yang total anggaran sebesar Rp1.200 triliun.

"Tapi, kemana kenaikan anggaran itu. Kebanyakan berputar di Jakarta dan kota-kota besar. Sementara untuk daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan pulau-pulau terluar hanya mendapat kucuran-kucuran yang kecil," katanya.

Padahal, dalam prioritas RPJPN (Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional) fokusnya adalah mempercepat daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan pulau terluar. Tapi dalam kebijakan anggaran, prioritas itu tidak nampak. "Ini merupakan pilihan prioritas dari pemerintah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa," ujar Fary yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Karena itu, ketika menyampaikan pandangan fraksi atas RUU tentang APBN 2011, Partai Gerindra menyetujui RUU itu dengan catatan di antaranya tersedianya lapangan pekerjaan, mewujudkan kedaulatan pangan, mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak dan non pajak, memutus ketergantungan pada utang, investasi eksplorasi sumber-sumber migas baru, dan subsidi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. ◀

66

**Seharusnya pemerintah dan parlemen memiliki sistem penganggaran masing-masing yang dipertemukan dalam pembahasan APBN...**

—SADAR SUBAGYO—



# Tak Ada yang Peduli pada Kemiskinan

Demokrasi yang berjalan di Indonesia berlawanan arah dengan kemakmuran. Rakyat hanya jadi korban.

OLEH IMAN FIRDAUS

**DASTY**, perempuan berusia 50 tahun, nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Warga Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Cilegon, Banten, itu ditemukan sudah tergantung di langit-langit kamar tidurnya. Jasadnya pertama kali ditemukan oleh Novi Maryati (17), anak kandungunya.

Novi langsung berteriak memanggil ayahnya, Nurman, yang sedang tidur di kamar depan. Sejumlah tetangga yang mendengar teriakan pun berdatangan. Mereka membantu menurunkan tubuh Dasty yang tergantung di bawah langit-langit kamar. Lilitan kain di leher korban pun dilepaskan.

Polisi yang datang ke tempat kejadian perkara menduga, korban nekat bunuh diri karena kesulitan ekonomi. "Dugaan sementara, motifnya karena alasan ekonomi," kata Kepala Polsek Pulomerak Ajun Komisariss Indra Hermawan. Dugaan itu diperkuat dengan keterangan keluarga dan warga lain bahwa tiga bulan terakhir, korban mengalami depresi.

Sebelumnya, korban juga pernah berupaya bunuh diri dengan cara gantung diri di bawah pohon mangga. Namun, upaya itu gagal dilakukan karena keburu diketahui warga dan suaminya. Sehari-hari, suami korban bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan rata-rata Rp 20.000. Kondisi itulah yang diduga menjadi penyebab Dasty depresi.

Dasty bukanlah korban pertama yang bunuh diri akibat didera kemiskinan. Sebelumnya sudah puluhan orang mengakhiri hidup dengan cara yang sama. Bahkan mungkin, korban masih akan terus berdatangan bila pemerintah abai terhadap kondisi masyarakat bawah saat ini, yang hidupnya makin melarat.

Namun, pemerintah menyampaikan kepada publik berdasarkan data dari BPS mengenai angka kemiskinan yang pada tahun ini sebesar 13,33% atau 35 juta orang dari sekitar 237 penduduk Indonesia. Tapi, sebagian masyarakat menganggapnya data itu kebohongan, karena tak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Setidaknya ada tujuh butir pernyataan pemerintah yang dinilai berhasil, namun di lapangan mengindikasikan lain. Misalnya, pemerintah mengklaim bahwa pengurangan kemiskinan mencapai 31,02 juta jiwa. Padahal, data penerimaan beras rakyat miskin pada 2010 mencapai 70 juta jiwa dan penerima layanan kesehatan bagi orang miskin

(Jamkesmas) mencapai 76,4 juta jiwa".

Bahkan para pengamat ekonomi sudah menyampaikan bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah kemiskinan struktural. Masalah struktural yang melingkupi masyarakat miskin antara lain ketidakadilan penguasaan produksi, terutama tanah, kualitas SDM, subsidi, dan akses kepada pasar. Kemiskinan itu, menurut ekonom Hendri Saporini, menumpuk di perdesaan. "Bagi pekerja di sektor informal seperti petani yang berjumlah 28,3 juta keluarga, faktor penyebab kemiskinan struktural, terutama menyangkut tanah dan modal," kata Hendri.

Faktor tanah, misalnya, sampai saat ini kepemilikan lahan petani di Jawa rata-rata 0,3 hektar dan di luar Jawa 0,5 hektar. Pemerintah dinilai kurang fokus dalam pemanfaatan tanah sehingga petani tidak dapat meningkatkan produksinya. Kebijakan *landreform* yang dicanangkan sejak Kabinet Indonesia Bersatu I pada 2005, dalam kenyataannya hanya sebatas wacana.

“

**Dana publik sebagian besar justru habis untuk membiayai pejabat birokrasi daripada untuk membiayai kepentingan rakyat.**

Dari sisi modal, nyaris tak ada produk pembiayaan yang cocok dengan sektor pertanian. Dari sisi produksi, harga pupuk juga kian mahal disertai ketergantungan pada bibit impor. Dari sisi pasar, masuknya barang-barang impor membuat petani lokal kesulitan bersaing.

"Dari sisi pasar dan produk, tidak ada keberpihakan atau strategi untuk melindungi produk dalam negeri mulai dari gula, beras, kedelai. Jadi, kebijakan tidak pro kelompok miskin. Miskin turun-temurun, dari kakeknya, bapaknya, anaknya miskin," tandasnya.

Kondisi ini diperparah oleh



FOTO MUSTAFA KEMAL

**KEMISKINAN yang terjadi di Indonesia saat ini adalah kemiskinan struktural.**

kebijakan pusat-daerah yang tak sinkron. Dana publik sebagian besar justru habis untuk membiayai pejabat birokrasi daripada untuk membiayai kepentingan rakyat. Kalau lihat APBD di seluruh daerah, hampir 70% di antaranya untuk membayar gaji dan operasional birokrasi, sisanya baru untuk rakyat. Bagaimana rakyat mau sejahtera dengan komposisi pengeluaran seperti itu?

Dampak lebih jauh, program-program pemerintah dan pelayanan publik tidak efektif. Indeks pembangunan manusia Indonesia tidak pernah meningkat, tingkat kemiskinan juga tak berkurang. Jika negara ingin serius memikirkan bangsanya, maka komposisi belanja birokrat dan kebutuhan rakyat dibalik, yakni 70% untuk pelayanan rakyat, 30% untuk belanja birokrasi. Belum lagi penguasaan uang negara ke sektor-sektor lain, semisal perbankan, perpajakan, hingga ke tingkat legislatif.

Di sisi lain, harga-harga terus melambung membuat kemiskinan

masyarakat semakin lengkap. Produk susu, misalnya, sejak 2011 naik paling tinggi, sekira 6,2%. Data badan pangan dunia atau Food and Agriculture Organisation (FAO) awal Pebruari menyebutkan: "Harga pangan dunia belum akan surut dalam beberapa bulan ke depan, sehingga FAO memberikan peringatan kepada negara-negara miskin yang akan terkena pukulan berat," kata ekonom dan ahli kebijakan FAO, Abdolreza Abbassian. Ini artinya, Indonesia akan masuk ke dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam lagi.

Indeks Harga Pangan FAO, yang memonitor perubahan harga-harga sejumlah komoditas pangan mencapai 231 poin pada Januari, naik 3,4% dibandingkan Desember. Ini adalah indeks harga pangan tertinggi sejak FAO mulai menghitung harga pangan pada tahun 1990.

Selain produk susu, harga minyak goreng dan lemak juga naik signifikan, yakni sekira 5,6% dibandingkan tahun lalu. Sedangkan sereal naik 3% akibat berkurangnya

suplai gandum dan jagung.

Menurut Abdolreza, satu-satunya faktor yang bisa meredam adalah sejumlah negara yang berhasil mendapatkan panen yang baik sehingga harga pangan domestiknya bisa lebih rendah dari harga pangan dunia. Namun, data dari FAO yang dirilis menunjukkan Indeks Harga Pangan menembus 200 poin pada 2008 menyusul terjadinya krisis pangan. Level tersebut kembali tertembus untuk pertama kalinya pada Oktober 2010, tepatnya pada 205 poin dan terus menanjak hingga awal 2011 ini. Bagi Indonesia, peningkatan harga komoditas bahan pangan internasional tentunya akan memengaruhi naiknya harga bahan pangan domestik. Berdasarkan pengalaman 2008, kenaikan harga minyak mendorong peningkatan hampir seluruh harga bahan pangan, baik internasional maupun domestik. Lonjakan harga inilah yang akan mengakibatkan inflasi.

Hantaman harga masih belum reda. Setelah aksi unjuk rasa yang kian panas di Timur Tengah, khususnya Mesir, telah mendongkrak harga minyak dunia. Kurtubi, pengamat industri migas, meyakini situasi di Mesir akan memberikan dampak bagi perkembangan harga minyak dunia, termasuk di Indonesia. Apalagi jika hal tersebut dikaitkan dengan adanya rencana pengaturannya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Tanah Air mulai akhir kuartal I tahun 2011. Dia memperkirakan harga BBM non-subsidi itu pada awal April 2011 bisa mencapai Rp9.000 per liter.

Bisa dibayangkan, kalau kenaikan harga BBM itu akan mempengaruhi seluruh harga barang dan jasa. Dan korban pertamanya adalah rakyat yang tidak bersalah. Sebab, besar kemungkinan jika kebijakan pembatasan BBM bersubsidi jadi dilakukan April tahun ini, maka rakyat akan menyadari bahwa kebijakan itu salah.

Apalagi, jika gejolak di Mesir bisa menular ke negara tetangga maka harga minyak dunia bisa terkerek ke kisaran US\$95 -US\$100 per barel dan pertamax di Indonesia bisa menembus angka Rp10.000 per liter. Berdasarkan pengalaman 2008, kenaikan harga minyak mendorong peningkatan hampir seluruh harga komoditas bahan pangan.

Menurut Hendri, semestinya demokrasi berjalan beriringan dengan agenda peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun, di Indonesia, pertumbuhan demokrasi seolah berjalan sendiri ke arah yang berlawanan dengan kemakmuran rakyat. Kesuksesan Pemilu 2009 dan penyelenggaraan ratusan Pilkada sepanjang 2010, hanya sesuatu yang semu. ◀





FOTO MUSTAFA KEMAL

# Ahmad Muzani

SEKJEN DPP PARTAI GERINDRA

## Impian itu Semakin Dekat

**BAGI** kalangan politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) nama Ahmad Muzani (42) begitu lekat. Sangat dekat, seperti bulu mata dengan kornea. Nyaris tidak ada satupun politisi Gerindra yang tidak mengenal sosok Sekjen partai berlambang kepala burung Garuda ini.

Optimisme dan semangat Muzani menjadi obor tersendiri bagi kader dan simpatisan Gerindra. Apalagi, ia kerap menjadi juru bicara partai, menjawab setiap tanya yang diajukan oleh para pencari berita.

Seperti apa kepercayaan dan optimismenya menjejak ranah politik untuk membawa agenda besar Gerindra? Lalu apa pula makna tiga tahun Gerindra? Berikut petikan wawancara **M. Budiono** dari *Gema Indonesia Raya* dengan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra ini:

**Tahun ini Partai Gerindra genap berusia tiga tahun. Apa sih makna tiga tahun usia Gerindra ini menurut Bapak?**

Dalam tiga tahun ini partai Gerindra tidak banyak perubahan, seperti yang kita janjikan. Banyak keterbatasan dan rintangan yang kami temukan, dan itu membuat kami sadar, ternyata Gerindra belum apa-apa. Itulah kenyataan yang kami temukan, dan ini semua menjadi kado penting bagi Gerindra. Tidak ada kata lain, kita harus bekerja lebih keras lagi untuk mendapat kepercayaan rakyat, agar agenda-agenda besar bisa kita raih, dan janji perubahan bisa terwujud.

**Persoalan besar apa yang dihadapi Gerindra, hingga janji perubahan yang diusung susah direalisasikan?**

Ada dua persoalan yang hadapi, yaitu: *pertama*, perolehan suara kita kecil, menyebabkan jumlah perolehan kursi kita di semua tingkatan tidak begitu membahagiakan. Di

DPR kita hanya 4,6%, atau ekuivalen dengan 26 kursi.

Pertanyaannya adalah perubahan seperti apa yang akan kita usung dengan hanya 26 kursi dari 560 anggota DPR. Betapapun logisnya argumentasi yang kita berikan, bisa diterima akal sehat dan sangat beralasan, akan tetapi dengan jumlah kursi yang kecil itu membuat apa yang kita perjuangkan selalu kandas, kalah di dalam arena voting.

*Kedua*, kita tidak memegang kekuasaan, menyebabkan agenda besar yang kita usung menjadi terkendala. Andaikan (kalau boleh berandai-andai) pasangan Mega Prabowo memenangkan pertarungan dalam pilpres 2009, mungkin perubahan yang kita janjikan bisa dibuktikan. Tapi, karena jumlah kursi kita sedikit, dan kekuasaan eksekutif tidak berada di tangan kita, maka janji perubahan itu sampai sekarang masih menjadi hutang Gerindra kepada rakyat.

**Pelajaran apa yang bisa diambil dari pemilu 2009 itu?**

Salah satu pelajaran yang bisa kita petik adalah betapa waktu tidak bisa dibeli. Kita berdiri pada 2008, satu tahun sebelum pemilu, pada saat bersamaan partai-partai lain sudah melaksanakan konsolidasi, sementara Gerindra malah sibuk dengan verifikasi, sedangkan Pemilu April 2009 tidak mungkin digeser, dan waktu terus bergerak menuju ke arah itu. Oleh karena itu, waktu yang saat ini begitu panjang bagi kita menghadapi 2014 harus betul-betul kita maksimalkan.

**Tiga tahun berkiprah, capaian apa saja yang diraih oleh Gerindra?**

Gagasan kita tentang perubahan, perbaikan kehidupan terutama di bidang ekonomi sampai sekarang ini menjadi sebuah wacana politik ditingkat elit. Bagaimana pun konsep

perekonomian yang diperkenalkan oleh Prabowo menggema di seantero negeri sehingga menjadi wacana di tingkat pengambil kebijakan ekonomi. Juga meningkatnya kesadaran kita sebagai negara agraris. Meski selama ini pembangunan kita kurang menitik beratkan pada kelebihan kita sebagai negara agraris.

**Bagaimana pula kiprah Fraksi Gerindra di DPR RI?**



FOTO MUSTAFA KEMAL

**Nama** : H. Ahmad Muzani  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Tegal, 15 Juli 1968  
**Status** : Kawin dengan 4 anak  
**Pekerjaan** : – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra  
– Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra

Dalam beberapa hal di Komisi XI dan VI kita menolak privatisasi BUMN. Tapi suara itu kalah dibanding fraksi lain, atau lebih tepatnya suara itu dikalahkan oleh lobi. Kita juga menolak kepemilikan asing dalam hal tanah pada UU Pemukiman, meski kalah. Juga dalam isu-isu besar, seperti Century, Panja Mafia Pajak, partai besar yang mendominasi.

**Jadi, di mana sebetulnya posisi Fraksi Gerindra Di DPR RI?**

Sebagai partai yang berada di luar pemerintahan, tentu Gerindra memiliki posisi lebih netral. Artinya, kita memiliki kebebasan untuk berfikir lebih jernih, mana yang lebih mendekati kepentingan rakyat.

Misalnya, bagaimana pemerintah di satu sisi menyatakan swasembada pangan, tapi di sisi lain kita menemukan fakta terjadi impor beras sebesar 1,2 juta ton. Itu jelas sebuah paradoks, antara pengakuan pemerintah disatu sisi dan kenyataan lapangan di sisi lain.

**Bagaimana kesiapan Gerindra menghadapi 2014, termasuk mengusung Prabowo menjadi Presiden?**

Saat ini kita harus memanfaatkan momen yang masih relatif panjang menuju 2014. Dari pengalaman kita mengikuti Pemilu 2009, dan dari banyak hal rakyat berharap besar pada Gerindra. Keinginan menjadikan Prabowo sebagai Presiden pada 2014 saya rasa makin dekat, insya Allah akan jadi kenyataan. Kami merasakan betapa detak masyarakat mengharapkan tampilnya Prabowo menjadi presiden semakin besar. Begitu juga harapan masyarakat terhadap Gerindra.

Masalahnya, bagaimana kita memanfaatkan momentum ini dengan baik dan optimal, sehingga harapan dan impian itu jadi nyata. ◀



# Demokratisasi dan Islam Politik



OLEH AMRAN NASUTION

(Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra)

**LIBYA** adalah negeri makmur. Standar hidup penduduknya termasuk tertinggi di Afrika dengan jaminan kesehatan gratis. Begitu pula pendidikan, perumahan, dan air bersih. Semua tak usah bayar. Distribusi kekayaan penduduknya terhitung baik.

Cadangan minyaknya 46,4 miliar barel. Dengan produksi 1,6 juta barel/hari (1,5 juta di antaranya diekspor), dan penduduk hanya 6,4 juta, bisa dibayangkan betapa pentingnya negeri ini sebagai sumber energi dunia. Beberapa negara Eropa semacam Italia, Perancis, dan Jerman, menggantungkan minyak kepada Libya.

Tapi sekarang negeri ini berkecamuk. Gerakan rakyat menuntut pemakzulan Muammar Gaddafi yang sudah berkuasa 42 tahun dihadapi dengan kekerasan. Rakyat ditembak, bahkan diserang pesawat tempur. Maka 17 Maret lalu, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang memberlakukan zona larangan terbang (*no fly zone*). Rakyat sipil tak lagi dihadapkan dengan jet tempur.

Sejumlah negara seperti Inggris, Perancis, Kanada, Belgia, bersama Amerika Serikat, dua hari kemudian melakukan serangan udara guna melemahkan kekuatan tempur rezim Gaddafi. Rakyat mendapat kekuatan untuk menjatuhkan Gaddafi.

Peremuan 40 lembaga dan negara di London (antara lain NATO dan negara Arab) guna membicarakan Libya, 28 Maret lalu, tampak sepakat, Gaddafi memang harus turun. "Gaddafi telah kehilangan legitimasi untuk memimpin maka kami percaya ia harus pergi. Kami sedang bekerja dengan komunitas internasional untuk mencapai tujuan itu," kata Hillary Clinton, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat kepada wartawan di London.

Gaddafi berkuasa di Libya sejak 1969. Dia memang terlalu lama duduk di atas tahta dengan menjauhkan demokrasi dari rakyatnya. Apa yang terjadi merupakan gambaran umum di negara Arab lainnya. Sejumlah negara diperintah raja atau emir turun-temurun. Sejumlah lainnya dipimpin presiden tapi berkuasa seumur hidup. Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh, misalnya, sudah berkuasa sejak 1978, Husni Mubarak di Mesir sejak 1981, dan Ben Ali di Tunisia sejak 1987.

Di Syria, Presiden Bashar Al-Asaad memang baru jadi presiden sejak tahun 2000. Tapi ia sebetulnya menggantikan ayahnya Hafez Al-Asaad yang berkuasa selama tiga dekade, sampai maut datang menjemputnya. Pola yang sukses di Syria ini tampaknya akan ditiru negeri sekeliling. Maka di Mesir dan Yaman, waktu itu, kedua presiden meluluskan anaknya untuk jadi pengganti. Tiba-tiba sekarang semua berubah.

Selain di Libya, rakyat sedang memperjuangkan hak untuk bersuara di seantero negara Arab di Afrika Utara dan Timur Tengah. Keberhasilan rakyat Mesir menumbangkan Husni Mubarak dan Tunisia mengusir Ben Ali

demonstrasi rakyat.

Pada awalnya, Gaddafi menuduh organisasi teror Al-Qaida di balik perlawanan rakyat. Tuduhan itu tentu dimaksudkan agar Amerika Serikat dan Eropa mendukungnya. Gaddafi yang di awal berkuasa bersikap anti-Barat, belakangan memang semakin bermesraan dengan Barat. Ternyata Barat tak mendukungnya, malah memusuhinya, ketika ia harus menghadapi perlawanan rakyatnya.

Sekarang Libya terbelah. Gaddafi dan pengikutnya menguasai Ibukota Tripoli dan sekitarnya, sementara kaum perlawanan – menamakan diri *Libyan National Transitional Council* atau Lembaga Transisi Nasional Libya

penguasa itu sekarang disapu angin demokrasi yang justru disebarkan Amerika Serikat ke Timur Tengah, tanpa Amerika Serikat sendiri bisa membantu para sekutunya.

Bukan cuma itu. Selama ini para penguasa Arab selain menindas demokrasi, juga menindas aspirasi politik Islam. Di Mesir dan Jordania, partai Islam Ikhwanul Muslimin (*Muslim Brotherhood*) adalah terlarang. Para tokohnya ditangkap, malah dibunuh. Itu pula yang terjadi di Tunisia. Sejak 1992, partai Islam An-Nahdha dinyatakan terlarang. Para tokoh puncaknya lari dan bersembunyi di Inggris.

Sekarang bersamaan dengan bergolaknya revolusi rakyat, aspirasi politik Islam tampak mencuat di beberapa negara seperti Mesir, Tunisia, Libya, Aljazair, atau Jordania. Malah di Mesir, Ikhwanul Muslimin diduga akan jadi pemenang bila pemilihan umum diadakan akhir tahun ini. Di Mesir sekarang hanya ada dua kekuatan dominan: Ikhwanul Muslimin dan pengikut National Democratic Party (NDP), partai bekas Presiden Husni Mubarak yang selama ini menguasai Mesir.

Apa yang terjadi sesungguhnya sudah diramalkan oleh survei Pew Research Center, lembaga survei terkemuka dari Washington, terhadap sikap penduduk di negara yang disurvei: Lebanon, Turki, Jordania, Nigeria, Indonesia, Mesir dan Pakistan.

Seperti diumumkan lembaga itu awal Desember lalu, di negara berpenduduk mayoritas Muslim itu, demokrasi lebih disukai dalam sistem pemerintahan. Dukungan terhadap demokrasi di Lebanon (81%), Turki (76%), Jordania (69%), Nigeria (66%), Indonesia (65%), Mesir 59%), dan Pakistan (42%).

Survei itu juga menemukan bahwa mayoritas responden mendukung peran Islam dalam politik. Misalnya, ketika ditanya apakah pengaruh Islam dalam politik negatif atau positif? Responden yang menjawab positif di Indonesia (91%), Mesir (85%), Nigeria (82%), Jordania (76%), Pakistan (69%), dan Lebanon (58%). Di Turki pendapat responden sedikit terbelah: positif (38%) dan negatif (31%). Artinya, mayoritas responden masih mendukung politik Islam. Untuk diketahui, pemerintahan Turki sekarang dikuasai partai Islam, AKP. ◀



**“ Para pemimpin otoriter di negara Arab tersingkir satu persatu. Mulai Ben Ali, lalu Mubarak. Kemudian Gaddafi menyusul.**

– dengan demonstrasi besar – membangkitkan semangat rakyat melawan rezim otoriter.

Pergolakan menjalar ke mana-mana: Bahrain, Oman, Jordania, Aljazair, Maroko, selain sejumlah negara Arab yang sudah disebut di atas. Di Syria, Bashar Al-Asaad mengerahkan puluhan ribu pendukung untuk menandingi

– menjadikan Benghazi, kota terbesar kedua, sebagai pusat perlawanan.

Amerika Serikat dan sekutu Eropanya serba sulit. Sebutlah Husni Mubarak di Mesir, Ben Ali di Tunisia, atau Raja Abdullah di Jordania. Mereka semua adalah sekutu, terutama dalam hubungan dengan Israel. Dan para



**DPP PARTAI GERINDRA MENGUCAPKAN:**

*Selamat atas terpilihnya*

**Kader Partai GERINDRA LONGKI DJANGGOLA  
Sebagai Gubernur Sulawesi Tengah**





## DISKUSI PUBLIK PARTAI GERINDRA

# Bencana Pangan Bukan Ilusi Semata

Partai Gerindra mengingatkan ancaman krisis pangan yang sudah di depan mata. Bila lalai, bencana taruhannya.

OLEH IMAN FIRDAUS

**KRISIS** pangan sudah di depan mata. Tidak terkecuali bagi Indonesia. Hal itu disebabkan oleh banyak faktor yang melanda beberapa negara penghasil pangan dunia. Misalnya, krisis minyak dunia pada 2007-2008, di mana pangan dikonversi menjadi bioenergi. Akibatnya suplai pangan turun, dan pada saat yang sama harga pangan dunia meningkat tajam.

Saat ini, keadaan diperparah oleh perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen di sebagian negara dunia. Volume perdagangan dan stok pangan dunia pun menurun. Khusus di Indonesia, yang juga memengaruhi kondisi pangan adalah perubahan lahan pertanian menjadi perumahan, jalan bahkan apartemen.

Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dianggap sudah tidak relevan lagi. Karena, selama 15 tahun berselang, banyak peristiwa yang tidak terantisipasi ketika undang-undang ini dibuat. Seperti perubahan iklim, ancaman biologi, dan kesehatan pangan.

Nah, saat ini komisi IV DPR sedang berinisiatif melakukan revisi undang-undang tersebut. Menurut wakil ketua komisi IV Herman Khaeron, revisi undang-undang diperlukan agar sesuai dengan kondisi saat ini. Masyarakat juga makin sadar kesehatan pangan.

Fraksi Partai Gerindra di DPR menga-



FOTO MUSTAFA KEMAL

“Kalau sehari tiga kali saja kita makan mi, itu setara dengan Rp 300 triliun setahun, lebih dari kasus dana talangan Bank Century...”

—SUHARDI—

dakan diskusi publik dengan tema “Pangan untuk Rakyat” di gedung DPR, 11 Februari 2011, untuk memberi masukan guna revisi Undang-undang tersebut. Bagi Partai Gerindra, pangan bukan sekadar santapan, tapi merupakan martabat bangsa, yakni sebagai kebanggaan masyarakat. Caranya dengan mengolah pangan yang ada di bumi Indonesia.

Karena itu, pangan yang dikonsumsi adalah sesuai dengan keadaan tanah dan masyarakat Indonesia. Karena itu, bahan pangan dari gandum seperti mi instan tidak cocok untuk masyarakat. “Kalau sehari tiga kali saja kita makan mi, itu setara dengan Rp 300 triliun setahun, lebih dari kasus dana talangan Bank Century,” kata Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi.

Menurut Suhardi, pangan kalau perlu tidak perlu distribusi. Kalau pun distribusi, hanya untuk ekspor. Seperti masyarakat Papua yang biasanya makan sagu, tidak perlu lagi membeli beras dari luar. “Namun sekarang malah akan dibuat *food estate*, untuk masyarakat Papua,” ujarnya.

Pangan yang didatangkan dari luar, seperti berbahan dasar gandum telah menggerogoti kebanggaan masyarakat Indonesia pada makanan lokal. Padahal, berdasarkan pengalanan Suhardi, di Jepang harga ubi mencapai Rp 500 ribu per kilo. Sementara hotel-hotel berbintang di Vietnam sudah terbiasa menyaji-

kan makanan ringan berupa ubi jalar dan ubi rambat. “Kapan hotel-hotel kita mau menyajikan makanan lokal? Mereka harus dipaksa untuk menyajikannya, kalau tidak tutup saja, dan kita buat hotel sendiri,” lanjutnya.

Karena itu, masukan terhadap draf RUU perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, bukan sekadar distribusi dan keamanan pangan. Namun juga memanfaatkan kekayaan dan keanekaragaman pangan yang ada di tanah Nusantara.

Sebab, dari sisi iklim dan tanah, Indonesia sangat cocok untuk bertanam pangan lokal. Namun yang terjadi saat ini penghamburan lahan untuk kepentingan yang bertentangan dengan pengembangan pangan lokal. Misalnya, banyak jalan yang ditutup semen, lahan-lahan di perkotaan hanya dimanfaatkan untuk menanam “pohon lampu”. Padahal lahan-lahan itu sangat baik bila ditanami pohon buah-buahan. Dan yang tak kalah menyedihkan adalah banyak lahan yang dibiarkan menganggur tanpa diolah.

Sementara itu, menurut anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Gerindra Agung Jelantik Sanjaya, produk undang-undang yang dihasilkan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu, agar produk legislasi yang dihasilkan nanti bermanfaat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu ketahanan pangan, dalam arti ketersediaan pangan dalam arti luas.

Partai Gerindra berkepentingan memberikan masukan, mengingat pada 2025 negara-negara di Asia, termasuk Indonesia, akan mengalami kekurangan pangan. Sedangkan Eropa dan Amerika Utara justru akan berlebih. Jadi, bencana yang diakibatkan oleh pangan itu bukan ilusi semata, namun sedang mengintip masyarakat kita bila tak waspada. ◀

## AHMAD MUZANI Gerindra Yakin Pada 2014

**PARA** politisi di parlemen kembali menggulirkan wacana syarat minimal pembentukan fraksi di DPR. Yakni, jumlah minimal anggota yang harus dipenuhi oleh setiap partai politik, dengan merujuk pada Undang-undang Partai Politik. Memang, terasa ada arogansi dari partai besar untuk mengerdilkan partai-partai yang baru masuk ke DPR. Tapi wacana itu ditanggapi penuh percaya diri oleh para politisi Gerindra di DPR. “Bagi Gerindra tidak ada masalah. Sebab, yakin kader Partai Gerindra banyak yang akan lolos ke DPR pada pemilu 2014 nanti,” kata wakil ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Namun Muzani tidak sependapat jika peningkatan syarat minimal jumlah anggota dalam pembentukan fraksi, akibat banyaknya rangkap jabatan anggota dewan selama ini. Seperti dikeluhkan oleh sebagian anggota bahwa satu anggota dewan biasanya merangkap beberapa jabatan, di alat kelengkapan sehingga mengganggu tugas kedewanan.

Persoalan utama adalah bagaimana meningkatkan kinerja para anggota. Salah satu ukuran kinerja adalah kedisiplinan saat mengikuti rapat-rapat yang digelar, baik internal anggota maupun bersama mitra kerja. “Sehingga tugas kedewanan bisa diselesaikan,” lanjut Sekjen Partai Gerindra ini, seraya menambahkan bahwa saat ini berkembang pula wacana membangun ruang baru dekat ruang paripurna, dengan tujuan para anggota rajin rapat. Apakah itu akan menjadi jaminan, kan tidak,” tandasnya. ◀ IMAM FIRDAUS

## AGUNG JELANTIK “Jaring Asmara” ke Bali



**PARTAI** Gerindra paling depan dalam membela dan memperjuangkan nasib petani. Dalam manifesto perjuangan partai, ekonomi kerakyatan adalah basis yang tidak boleh ditinggalkan. Maka, ketika komisi IV akan membuat RUU (Rancangan Undang-undang) Pemberdayaan dan Perlindungan Petani (PP) dan revisi atas Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, Agus Jelantik Sanjaya antusias mengikutinya. Anggota komisi IV dari daerah pemilihan Bali ini, tak pernah absen di ruang sidang untuk mendengarkan masukan dari para pakar. Beberapa masukan dia simak, termasuk memberikan pertanyaan.

Ketika harus mengadakan jaring aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) ke tiga perguruan tinggi, Agus pun tak mau ketinggalan. “Saya akan ikut rombongan ke Universitas Udayana Bali,” katanya. Di sana, Agus bertemu sejumlah pakar pertanian dan masyarakat untuk mendengarkan masukan.

Dua RUU yang kini dibahas di komisi IV itu, langsung menyangkut petani. Untuk RUU PPP, misalnya, akan memasukkan pasal-pasal soal pemberdayaan dan perlindungan kepada para petani. Misalnya, perlindungan dari mekanisme pasar bebas atau penggantian berupa asuransi bila gagal

panen. Sebab selama ini, petani tidak pernah dilindungi. Bahkan ketika gagal panen, mereka harus menanggung derita sendirian. Sebaliknya ketika panen, harga justru jatuh dan kalah dari komoditas impor. ◀ IMAM FIRDAUS

## DESMON J. MAHESA Peradilan Pajak Harus jadi Peradilan Umum

**TERBONGKARNYA** kasus mafia pajak yang melibatkan sejumlah pihak, bermula dari peradilan pajak yang tidak transparan. Para pihak bisa memainkan kepentingannya asal memberikan bayaran yang sudah ditentukan. Hal itu yang membuat anggota komisi III Desmond J. Mahesa berniat mendorong peradilan pajak agar menjadi peradilan umum di Panja Anti Mafia Pajak Komisi III DPR. “Sebab selama ini, peradilan pajak sangat tertutup. Terbongkarnya kasus mafia pajak Gayus Tambunan dan Bahasyim, juga karena peradilan pajak yang tidak transparan,” katanya.

Panja Anti Mafia Pajak yang telah dibentuk Komisi III, kata Desmond, harus bergerak dari kasus-kasus peradilan pejak tersebut. Desmond mengakui bahwa Panja ini sebagai respons atas maraknya kasus mafia pajak yang selama ini terungkap.

Panja Anti Mafia Pajak Komisi III sudah menetapkan ketuanya adalah Tjatur Sapto Edy. Mereka akan bekerja dengan mengundang sejumlah pihak mulai aparat kepolisian, Dirjen Pajak hingga terpidana Gayus Tambunan. ◀ IMAM FIRDAUS



## BUDI SATRIYO DJIWANDONO

### Berjuang Melalui Tidar

**TINGGI** semampai dan badannya selalu dibalut oleh pakaian yang rapi. Itulah sosok keseharian **Budi Satriyo Djiwandono**, Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Tunas Indonesia Raya (Tidar).

Dalam posisinya itu, Budi menjadi lebih paham mengenai masalah yang dihadapi kalangan muda. Ia berharap pada tahun 2014 kelak Tidar bisa membangun 2-3 pemula untuk Gerindra sebagai haluan politik mereka.



FOTO MUSTAFA KEMAL

Budi Satriyo punya cara untuk itu. Tidar harus semakin sering mendekati diri dengan kalangan remaja. Misalnya, melaksanakan kegiatan kreatif yang disukai remaja, seperti kegiatan olah raga dan seni.

“Selama tiga tahun kami telah menggelar ‘Tidar Cup’. Kegiatan ini terbukti mampu mendekati Partai dengan para pemilih pemula. ‘Semoga pada saatnya nanti, kerja keras kami selama ini akan membuahkan hasil yang lebih baik bagi Gerindra,’ kata Budi penuh harap.

Hingga saat ini Tidar sudah ada di 20 provinsi, dan berharap dalam waktu dekat Tidar sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia. Ia mengakui mengejar cita-cita itu memang tidak mudah, apalagi kebanyakan remaja kerap kali bersikap tak acuh terhadap partai.

Budi mengakui, perkembangan Tidar bisa dibidang lamban. Itu ada sebabnya, “Karena kami serius dalam memilih dan menentukan pengurus di daerah,” ungkap Budi. Dan, “Inilah risiko yang harus diambil, karena kami tidak ingin mendapat pengurus yang asal-asalan. Mereka harus memiliki dedikasi, loyalitas dan punya kemampuan, dengan melibatkan psikiater,” ujar Budi. ◀ **M. BUDIONO**

## SURIA ATI KUSUMAH

### Dari Perempuan untuk Perempuan

**PERAYAAN** HUT ke-3 Partai Gerakan Indonesia Raya, pada Sabtu (5/2) dihadiri ribuan kader dan simpatisan Partai Gerindra. Salah satunya adalah **Suria Ati Kusumah**, Humas Pimpinan Pusat Perempuan Indonesia Raya (PIRA). Ia terlihat begitu bersemangat mengikuti satu demi satu hajatan perayaan harlah Gerindra tersebut.

Di tengah-tengah keramaian itu, Suria Ati terlihat ramah. Ia rajin bertegur sapa dengan sejumlah pengurus DPP Partai Gerindra yang menandakan bahwa ia sudah terbiasa berada di lingkungan elit Gerindra. Sudah tentu, karena Suria Ati adalah calon anggota DPRD Provinsi Banten tahun 2009 dari Partai Gerindra, tapi gagal meraih kursi legislatif tersebut.

“Kegagalan menjadi anggota DPRD merupakan salah satu seni dalam politik. Karena itu saya tidak berputus asa,” tutur Suria Ati tetap penuh semangat. Ia bertekad untuk memajukan partai, dan berbuat untuk kejayaan Gerindra. “Jangan pernah menanyakan apa yang kita peroleh, tapi tanyakan apa yang sudah kita berikan bagi Gerindra”, ujar Suria Ati sumringah.



FOTO MUSTAFA KEMAL

Menurut Suria Ati, untuk memenangkan pemilu 2014, suara kaum perempuan harus lebih diperhatikan. Apalagi, sampai saat ini nasib kebanyakan perempuan belum sebaik kaum pria. Dan itulah menjadi perhatiannya sebagai ketua PIRA di Banten. ◀ **M. BUDIONO**



FOTO MUSTAFA KEMAL

## RACHEL MARYAM SAYYIDINA

### Tak Ingin Ngoyo Meraih Jenjang Karier

**KESUKSESAN** memang harus diperjuangkan. Namun, untuk menjadi sukses tidak harus selalu ngoyo, menghalalkan segala cara. Adakalanya, hidup juga musti dinikmati, lebih bagus lagi bisa disyukuri. Begitulah hari-hari yang tengah dijalani **Rachel Maryam Sayyidina** (30) sebagai politisi di Senayan, Jakarta.

Sukses menjejalkan kaki di ranah legislatif, tak lantas membuat peraih Piala Citra sebagai Aktris Pendukung Terbaik 2003 pada film *Arisan* ini tidak lalu meniru langkah yang ditempuh para selebriti yang seakan berlomba ingin meraih jabatan eksekutif sebagai kepala daerah. Dan, sekali lagi, Rachel tak ingin ngoyo dalam meraih jenjang karier yang lebih tinggi dalam dunia politik.

Baginya, yang terbaik saat ini adalah memperjuangkan aspirasi rakyat. Apalagi espektasi dan perhatian masyarakat terhadap dirinya selaku anggota dewan lebih besar dibanding sebagai artis. Karena itu, politisi perempuan dari Fraksi Partai Gerindra ini berusaha untuk berhati-hati, baik dalam bertutur kata maupun bertegur sapa. Termasuk dalam hal berbusana hingga bersopan santun.

Dalam rentang waktu nyaris tiga tahun berkiprah di Senayan, ibu satu anak yang akan menginjak usia 31 pada 20 April nanti, merasa kian nyaman. Pandangannya terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa juga kian luas. Jauh lebih luas, dibanding saat menjadi model atau pemain film. ◀ **M. BUDIONO**

## KI ENTHUS SOESMONO

### Bupati Gerindra

**BUKAN** Ki Enthus Soesmono namanya, kalau tidak bisa ngedan di atas panggung pentas wayang kulit. Ocehan yang mulutnya meluncur deras, menohok siapa saja yang dituju, tanpa tedeng aling-aling.

Saat membawakan lakon Bima Bungkus dalam perhelatan wayang kulit memperingati HUT ke-3 Partai Gerindra, Sabtu malam (5/2), Ki Enthus Soesmono terus menerus menjiplak isi sambutan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ia berani memprotes kebijakan pemerintah

soal impor beras. Ia tak takut menolak privatisasi BUMN yang gencar dilakukan penguasa.

Selain itu, Ki Enthus juga menyoroti skandal Bank Century, kasus Gayus, dan tak ketinggalan menyoroti kebobrokan lembaga peradilan. “Negara ini akan maju, kalau Presidennya Prabowo, dan Bupati Ki Enthus Soesmono,” katanya dalam salah satu dialog. Ah, si Enthus ini memang tak pernah kekurangan bahan guyonan. Ah, si Enthus memang edan. ◀ **M. BUDIONO**

FOTO ISTIMEWA







konomian rakyat dan koperasi.

Aktifis *Personal Development Club* ini juga mengkritik pola ekonomi liberalisme yang dikembangkan negara-negara besar, tetapi tidak membuat batasan yang jelas sampai di mana kebebasan itu. Maka terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat tajam di masyarakat, di mana harga ditentukan oleh kekuatan pasar. "Daya beli rakyat menjadi sangat menurun," ujar adik mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta Swasono.

Halida Hatta menganggap perlu ada perubahan sistem perekonomian, dari ekonomi pasar menjadi berorientasi pada pembangunan ekonomi *bottom-up*. Perubahan itu bagi Halida Hatta sangat mungkin terjadi, sebab semakin banyak masyarakat pada umumnya dan kaum perempuan khususnya, terjun dalam kegiatan politik. "Jadi, ada semacam dorongan untuk melakukan perubahan," ujarnya kepada *Gema Indonesia*

Itu bukan berarti putri proklamator kelahiran 25 Januari 1956 dan bekerja di *Unit Head Corporate Secretary* Trans TV itu tak mampu merehabilitasi rumah peninggalan orangtuanya itu, namun ia punya alasan tersendiri untuk itu. "Saya tak berniat untuk mengubahnya," ungkap alumni Program S2 International Relations, International University of Japan itu.

Halida Hatta, begitu ia biasa dipanggil, memang membiarkan semua interior rumah tua itu tetap seperti sedia kala, kecuali gording-gordin di jendela. Mungkin pemiliknya ingin memberikan kesan bahwa rumah yang terletak dan berhadapan dengan bekas Kantor DPP PDI Perjuangan itu adalah rumah kuno yang memiliki nilai sejarah yang tak ternilai.

Terlepas dari itu, rumah adalah cerminan dari pemiliknya. Dan, rumah yang terletak di daerah elit Menteng itu mencerminkan kesederhanaan seorang Halida. Penampilan dan gaya hidupnya juga sederhana, termasuk juga pandangan politiknya. Dalam menyalurkan aspirasi politik, alumni Universitas Indonesia ini juga penuh perhitungan.

Nah, ketika partai politik, besar dan kecil, memenuhi jagad politik Indonesia, tiba-tiba Halida Hatta lebih tertarik dan bergabung dengan partai baru bernama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). "Politik itu bukan hanya perlu disertai etika, tetapi juga butuh keteladanan, dan keteladanan itu adalah sebuah bentuk gaya hidup sederhana," katanya.

Keteladanan yang dimaksud oleh perempuan aktivis Masyarakat Peduli Guru itu ada-

*Raya* beberapa waktu lalu.

Adanya keinginan untuk melakukan perubahan juga merupakan sebuah koreksi terhadap reformasi yang telah kebablasan. Kenyataannya, sepuluh tahun pasca reformasi, kualitas hidup rakyat menurun. Reformasi memang telah menghasilkan sebuah perubahan, yaitu bisa mengakhiri kepemimpinan yang telah sangat membatasi perkembangan demokrasi.

Namun, reformasi yang dikenal selama ini tidak bertolak dari suatu konsep yang matang, akibatnya arahnya sulit ditebak. Akibat negatif dari reformasi tanpa konsep adalah selama sepuluh tahun terakhir ini rakyat hidup semakin susah. Telah terjadi liberalisme di dalam segala bidang, dan pranata masyarakat kita tidak pernah akan siap untuk perubahan yang tidak mempunyai konsep dan keseimbangan dalam proses adaptasi terhadap perubahan.

Halida Hatta membatah tuduhan yang menyatakan kaum perempuan tidak suka berpolitik. "Pendapat ini tidak terlalu relevan," ujar perempuan yang pernah menjadi calon legislatif nomor urut 1 Partai Gerindra untuk Dapil Jakarta Selatan ini. Menurut Halida Hatta, bila perempuan dianggap kurang berminat terhadap politik, tidak otomatis kaum lelaki senang dengan politik. "Tidak sedikit pula kaum lelaki yang tidak mau tahu soal politik," katanya.

Apabila untuk memenuhi kuota 30% perempuan di legislatif dirasakan sulit, mungkin juga karena banyak perempuan mempunyai profesi yang tidak bisa ditinggalkan, atau

## Halida Nuriah Hatta Pejuang Ekonomi Kerakyatan dan Kesetaraan Gender

FOTO MUSTAFA KEMAL

Aktifis Partai Gerindra, Halida Nuriah Hatta, ingin menjadi penerus perjuangan ayahnya, Proklamator Kemerdekaan RI, Mohammad Hatta. Putri bungsu Bung Hatta ini memilih Gerindra untuk kendaraan dalam meneruskan cita-cita ayahnya itu.

OLEH ARDI WINANGUN

EMPAT bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa merdeka, salah seorang proklamator, Mohammad Hatta atau lebih akrab dipanggil Bung Hatta, melangsungkan pernikahannya. Waktu pernikahan sengaja dipilih setelah Indonesia mereka, karena Bung Hatta mempunyai prinsip seperti Patih Gajah Mada dengan Sumpah Palapa-nya, yakni tidak mau bersenang-senang dahulu sebelum tujuan atau cita-citanya tercapai.

Di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, pada 18 November 1945, Bung Hatta secara resmi menikahi Rahmi Rachim. Dari per-

nikahan itu, lahirlah tiga orang putri, yaitu Meutia Farida, Gemala Rabi'ah, dan Halida Nuriah. Ketiga putri Bapak Koperasi Indonesia itu sekarang memakai kata Hatta di belakang namanya.

Kesederhanaan Bung Hatta dalam keseharian juga mengalir pada diri ketiga putrinya itu. Halida Nuriah Hatta, putri bungsu Bung Hatta misalnya, lebih memilih menempati rumah warisan ayahnya di Jalan Diponegoro, Cikini, Jakarta. Kondisi rumah itu tak ada yang berubah, masih seperti ketika Bung Hatta masih menempati rumah itu.

lah seperti yang dicontohkan oleh ayahnya, Bung Hatta, yang lebih mementingkan kerja ketimbang gemerlapnya popularitas. "Saat ini banyak orang yang mau bekerja keras, melakukan banyak aktivitas kemasyarakatan, tapi ujung-ujungnya hanya mengharapkan pujian dan mencari popularitas. Ingin pamrih begitulah," ujarnya dalam sebuah kesempatan.

Keteladanan yang dijadikan contoh oleh Halida Hatta adalah ketika Bung Hatta langsung turun ke tengah-tengah masyarakat. Bung Hatta tidak berpidato dan meminta pendapatnya didengarkan, melainkan ia mendengarkan langsung semua keluhan rakyat. Halida menuturkan, pesan ayahnya bahwa menjadi pemimpin itu berarti harus berani berkorban, bersedia berada pada situasi genting dan harus menyelesaikan kepentingan itu.

Di Partai Gerindra, Halida Hatta menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat. Di partai berlabang kepala burung garuda ini, ia tetap ingin memperjuangkan misi ayahnya, yakni pere-

dapat dipadukan dengan kegiatan politik. Misalnya, seorang dokter yang mempunyai tanggung jawab dalam jabatan dan praktik tidak mudah memutuskan untuk terjun menjadi caleg. Begitu pula yang memegang jabatan manajer atau direktur pada perusahaan-perusahaan.

Halida Hatta melihat Partai Gerindra punya komitmen untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk memperjuangkan kesetaraan hak dan fasilitas untuk pekerja/profesional perempuan. Sejalan dengan visi dan misi Partai Gerindra yang meletakkan rakyat sebagai subyek dalam pembangunan nasional, dan bukan jadi obyek," ungkap Halida Hatta.

Bung Hatta di tahun 1932 pernah mengatakan, .....dengan rakyat kita akan naik dan dengan rakyat kita akan turun. Hidup atau matinya Indonesia Merdeka, semua itu tergantung kepada semangat rakyat. Esensi dari kalimat itu adalah menjadikan rakyat sebagai subjek, karena dengan rakyat yang bersemangat kita mendapatkan bangsa yang bermartabat dan dihargai... ◀